

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal**

(Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai  
Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
OKTOBER 2011**

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal**

(Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai  
Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
OKTOBER 2011**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN**

No. Proposal : No. Proposal : / / /

1. a. Judul Penelitian : Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal (Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY).

b. Macam Penelitian : Lapangan

2. Personalia Penelitian :

a. Nama : Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. Usia saat pengajuan proposal : 44 tahun 4 bulan  
d. Jabatan akademik/Golongan : Asisten Ahli/ IV a  
e. Fakultas/Program Studi : ISIP/Sosiologi

3. Personalia Anggota Peneliti (bila ada)

a. Nama Anggota 1 (lengkap dengan gelar) : -  
b. Nama Anggota 2 (lengkap dengan gelar) : -

4. Lokasi Penelitian : Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Yogyakarta, Oktober 2011  
Peneliti

Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Andreas A. Susanto, PhD

Dr. Lukas Suryanto Ispandriarno, M.A

Ketua LPPM  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Ir. Y. Djarot Purbadi, MT

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perempuan yang melakukan usaha ekonomi produktif, kemudian melakukan Identifikasi kemampuan perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif, dan mengidentifikasi potensi sumber daya non manusia sebagai sumber berkembangnya usaha ekonomi produktif. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan untuk pengembangan manajemen komoditas yang berbasis potensi lokal?

Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY. Jenis penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dipadukan dengan penjelasan kualitatif untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan juga wawancara dengan beberapa nara sumber. Analisis data dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi dan tabulasi silang dengan memadukan dengan hasil analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Berdasarkan alokasi kegiatan domestik ini nampak bahwa alokasi waktu kegiatan sektor domestik bagi perempuan cenderung lebih lama jika dibandingkan laki-laki di lokasi penelitian. Kontribusi perempuan dari hasil berdagang kuliner di warung sekitar pantai cukup besar memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga mereka. Secara rerata peran domestik dan publik perempuan dan laki-laki di lokasi penelitian menunjukkan komposisi yang hampir berimbang, meskipun laki-laki untuk peran publiknya sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuannya. Pola relasi kerja baik antara nelayan-bakul ikan-pedagang kuliner warung, bukan semata-mata terjadi dalam kerangka hubungan ekonomis, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas “kesertaan secara sukarela”; tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut keanggotaan nelayannya dengan “cara membeli”. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara itu struktur ekonomi di lokasi wisata Pantai Kuwaru berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal desa. Lembaga-lembaga “kuasi” investasi tradisional seperti : arisan, hutang dan titipan uang masih eksis di lokasi penelitian ini. Hal ini dikarenakan kesederhanaan pemikiran ekonomi mereka dan ketidakinginan mereka berhubungan dengan hal-hal yang bersifat prosedural. Di lain pihak, “lembaga-lembaga keuangan informal” dan sistem “kuasi investasi” tersebut telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”. Berbagai bentuk dan pola perilaku ekonomi masyarakat sekitar Dusun Kuwaru yang bergerak di sektor perdagangan warung kuliner tersebut, tidak lain sebagai upaya (ikhtiar) mereka untuk senantiasa dapat mempertahankan hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial, budaya, sekaligus ekonomi yang senantiasa berubah ke arah yang lebih “modern” dan “praktis”, tetapi tetap bergerak dalam kerangka sebuah tradisi.

**Kata kunci :** *pemberdayaan perempuan pesisir, manajemen komoditas perkonomian, dan potensi lokal.*

# KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal (Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)", dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan untuk pengembangan manajemen komoditas yang berbasis potensi lokal?

Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak, terutama ditujukan bagi para pembaca dan peneliti yang menekuni kajian gender dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Tidak terkecuali juga hasil penelitian ini ditujukan pula bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, agar dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada keadilan gender.

Sehubungan dengan proses penyelesaian penelitian ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor serta para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung serta memberi kesempatan baik berupa moril maupun materiil kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Dekan, para Wakil Dekan, dan teman-teman sejawat Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
4. Tenaga lapangan yang dengan segenap waktu dan tenaganya membantu peneliti dalam pencarian data di lapangan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Kepala Desa dan Aparat Desa Poncosari yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan juga memberikan banyak informasi yang peneliti butuhkan.
6. Pengurus TPI dan Pagugupan Pedagang kakilima CEMARA ASRI di lingkungan lokasi penelitian yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
7. Para responden yang telah sudi meluangkan waktu dan pikirannya, serta banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi analisis penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak pula membantu sehingga terselesaikannya penulisan penelitian ini.

**Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan tulisan ini akan penulis terima dengan senang hati dan tangan terbuka demi penyempurnaan hasil tulisan.**

Akhir kata Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat penulis panjatkan, Karena berkat pertolongan-Nya maka penelitian dan tulisan ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terkait dengan masalah relasi gender dalam keluarga dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Yogyakarta, Oktober 2011

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Representasi Paradigma Pembangunan Kemiskinan .....	6
2.2. Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Gender di Bidang Usaha Ekonomi produktif .....	7
2.3. Langkah dan Pendekatan Pemberdayaan yang Tepat .....	8
2.4. Pemberdayaan Masyarakat .....	9
2.5. Pemberdayaan Perempuan .....	11
2.6. Cakupan Pemberdayaan .....	13
2.7. Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pantai .....	14
2.7.1. Pendekatan Struktural .....	15
2.7.2. Pendekatan Subyektif .....	19
2.8. Pemberdayaan Masyarakat pesisir .....	21
2.9. Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir .....	23
2.10. Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga Nelayan ..	26
2.11. Relasi Kuasa Laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Pesisir .....	28
<b>BAB III MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1. Masalah Penelitian .....	32
3.2. Tujuan Penelitian .....	32
3.2. Manfaat Penelitian .....	32

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1. Obyek dan Lokasi Penelitian .....	34
4.2. Populasi dan Sampel .....	34
4.3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4.4. Teknik Analisis Data .....	35

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Deskripsi Daerah Penelitian .....	36
5.1.1. Kondisi Geografis .....	36
5.1.2. Keadaan Demografi .....	38
5.1.2.1. Penduduk .....	38
5.1.2.2. Mata Pencaharian .....	39
5.1.3. Kondisi Sosial Budaya .....	40
5.1.3.1. Pendidikan .....	40
5.1.3.2. Sarana dan Prasarana Desa .....	40
5.1.3.3. Struktur Masyarakat .....	42
5.1.3.4. Kehidupan Religius .....	43
5.2. Profil Umum Dusun Kuwaru .....	46
5.2.1. Kondisi Fisik Dusun Kuwaru .....	46
5.2.2. Letak wilayah Dusun Kuwaru .....	47
5.2.3. Wilayah Administratif Dusun Kuwaru .....	47
5.2.4. Kependudukan .....	47
5.2.5. Perekonomian .....	48
5.2.6. Fasilitas Pendidikan dan Ibadah .....	49
5.2.6.1. Fasilitas Pendidikan .....	49
5.2.6.2. Fasilitas Ibadah .....	49
5.2.7. Jaringan Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi .....	49
5.2.7.1. Jaringan Air Bersih .....	49
5.2.7.2. Jaringan Listrik .....	49
5.2.7.3. Jaringan Telekomunikasi .....	49
5.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	50
5.3.1. Potensi Wisata Pantai Kuwaru .....	50
5.3.2. Dusun Kuwaru dan Obyek Wisata di Sekitarnya .....	50
5.3.2.1. Dusun Kuwaru dan Potensinya .....	50
5.3.2.2. Dusun Kuwaru dan Pengembangan Sosial-Budaya .....	51
5.3.2.2.1. Partisipasi Masyarakat .....	51
5.3.2.2.2. Inkulturasi Budaya .....	53
5.3.2.3. Pengembangan Ekonomi Dusun Kuwaru .....	53
5.3.3. Pengembangan Pariwisata Pantai Kuwaru .....	53
5.3.3.1. Sistem Pemasaran Produk Kuliner Kawasan Pantai Kuwaru .....	53
5.3.3.2. Produk Pariwisata Pantai Kuwaru .....	54

5.3.4. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Komoditas Perekonomian Lokal .....	59
5.3.4.1. Kondisi Status Sosial Ekonomi Responden Dan Keluarga .....	59
5.3.4.2. Peran Gender Dalam Keluarga Responden .....	70
5.3.4.3. Komoditas Perempuan Berbasis Potensi Lokal .....	78
5.3.4.3.1. Kegiatan Perempuan pada Aktivitas Kuliner di Sekitar Pantai Kuwaru .....	78
5.3.4.3.2. Pola Relasi dan Jaringan Aktivitas Nelayan, Penjual Ikan dan Pedagang Kuliner Warung di Sekitar Pantai Kuwaru .....	83
5.3.4.3.3. Kepemimpinan Ekonomi dan Pengembangan Struktur Ekonomi Lokal .....	85
5.3.4.3.4. Lembaga-lembaga “Kuasi” Investasi Tradisional: Arisan, Hutang, dan Titip Uang .....	86
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	89
6.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>



# DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.1.</b>	Tahapan Pemberdayaan Kap Dengan Pendekatan Afektif, Kognitif, Psikomotorik Dan Konatif .....	<b>14</b>
<b>TABEL 5.1.</b>	Keadaan Gelombang dan Angin .....	<b>37</b>
<b>TABEL 5.2.</b>	Perubahan Penduduk Desa Poncosari tahun 2000-2010 .....	<b>39</b>
<b>TABEL 5.3.</b>	Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncosari tahun 2001-2010 .....	<b>39</b>
<b>TABEL 5.4.</b>	Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan tingkat pendidikan th 2010 .....	<b>40</b>
<b>TABEL 5.5.</b>	Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan agama yang dianut ...	<b>44</b>
<b>TABEL 5.6.</b>	Jumlah sarana peribadatan Desa Poncosari tahun 2010 .....	<b>44</b>
<b>TABEL 5.7.</b>	Jumlah dan Sebaran Penduduk Dusun Kuwaru per-wilayah RT .....	<b>48</b>
<b>TABEL 5.8.</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	<b>48</b>
<b>TABEL 5.9.</b>	Komposisi Mata Pencaharian Penduduk .....	<b>48</b>
<b>TABEL 5.10.</b>	Tingkat Pendidikan Penduduk di Dusun Kuwaru .....	<b>49</b>
<b>TABEL 5.11.</b>	Fasilitas Ibadat di Dusun Kuwaru .....	<b>49</b>
<b>TABEL 5.12.</b>	Parameter Keterlibatan Masyarakat .....	<b>51</b>
<b>TABEL 5.13.</b>	Daftar Fasilitas di Pantai Kuwaru .....	<b>52</b>
<b>TABEL 5.14.</b>	Pengembangan Produk Wisata Dusun Kuwaru .....	<b>54</b>
<b>TABEL 5.15.</b>	Potensi Wisata di Dusun Kuwaru .....	<b>55</b>
<b>TABEL 5.16.</b>	Umur Responden .....	<b>59</b>
<b>TABEL 5.17.</b>	Tingkat Pendidikan Responden .....	<b>60</b>
<b>TABEL 5.18.</b>	Tingkat Pendidikan Pasangan Responden .....	<b>62</b>
<b>TABEL 5.19.</b>	Alasan Responden Atas Pilihan Pekerjaan .....	<b>63</b>
<b>TABEL 5.20.</b>	Jenis Pekerjaan Responden dan Rata-rata Pendapatan Responden	<b>64</b>
<b>TABEL 5.21.</b>	Jenis Pekerjaan Pokok Pasangan Responden dan Rata-rata Pendapatan Pasangan Responden .....	<b>67</b>
<b>TABEL 5.22.</b>	Kondisi Rumah Keluarga Responden .....	<b>68</b>
<b>TABEL 5.23.</b>	Kepemilikan Ternak Oleh Keluarga Responden .....	<b>70</b>
<b>TABEL 5.24.</b>	Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Domestik Responden dan Pasangan Responden .....	<b>72</b>
<b>TABEL 5.25.</b>	Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Publik Responden dan Pasangan Responden .....	<b>73</b>
<b>TABEL 5.26.</b>	Alokasi Waktu Untuk Keperluan Pribadi Responden dan Pasangan Responden .....	<b>75</b>
<b>TABEL 5.27.</b>	Alokasi Waktu Untuk Seluruh Aktivitas Keseharian Responden dan Pasangan Responden .....	<b>76</b>
<b>TABEL 5.28.</b>	Alokasi Waktu Kegiatan Sepasang Suami Istri .....	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 5.1.</b>	Peta Dusun Kuwaru .....	<b>46</b>
<b>GAMBAR 5.2.</b>	Wilayah Administratif Pembagian RT Dusun Kuwaru .....	<b>47</b>
<b>GAMBAR 5.3.</b>	Pondok-pondok Warung Makan di Pantai Kuwaru .....	<b>55</b>
<b>GAMBAR 5.4.</b>	Kolam renang air tawar di Pantai Kuwaru .....	<b>56</b>
<b>GAMBAR 5.5.</b>	Area Permainan Motor ATV .....	<b>56</b>
<b>GAMBAR 5.6.</b>	Kawasan Pedesaan yang Masih Alami dapat Dijadikan Jalur Kegiatan Rekreasi <i>Outbond</i> .....	<b>56</b>
<b>GAMBAR 5.7.</b>	Aktifitas Jelajah Desa dengan Media Transportasi Sepeda .....	<b>56</b>
<b>GAMBAR 5.8.</b>	Kereta Kelinci sebagai Media Transportasi Missal untuk Membawa Wisatawan .....	<b>58</b>
<b>GAMBAR 5.9.</b>	Rumah-rumah Penduduk yang Dapat Difungsikan sebagai <i>Homestay</i> bagi Para Wisatawan.....	<b>58</b>
<b>GAMBAR 5.10.</b>	Salah Satu Warung Kuliner dan Pedagang Ikan di Kuwaru .....	<b>78</b>
<b>GAMBAR 5.11.</b>	Lapak Sekitar Kuwaru dan Aktivitas Kuliner .....	<b>79</b>
<b>GAMBAR 5.12.</b>	Pedagang Ikan Mentah, Suasana Teduh Sekitar Lapak, Keramaian di Pantai dan Penyewaaan Motor ATV di Pantai Kuwaru .....	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang :**

Diskursus mengenai kekayaan laut dan kemiskinan merupakan kontroversi yang tidak pernah ada ujungnya. Laut yang dipenuhi kekayaan ikan dan biota lainnya, sedangkan fenomena kehidupan masyarakat pesisir selalu dicirikan oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan. Keadaan ini sangat fantastis. Masyarakat nelayan sebagai ciri komunitas yang relatif dominan di wilayah pantai, seringkali diliputi oleh masalah perekonomian yang kurang stabil. Khususnya masalah partisipasi gender serta pemberdayaan perempuan yang masih terbatas.

Daerah pesisir Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo memerlukan pemberdayaan perempuan di bidang perekonomian. Realitas saat ini menunjukkan masih rendahnya kemampuan, kualitas serta produktivitas perempuan dalam pengelolaan komoditas perekonomian menjadikan penduduk sekitar pantai tetap miskin dan tidak berkembang. Kearifan lokal sebagai modal sosial dapat memberikan inspirasi alternatif pemberdayaan agar lebih tepat sasaran, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara proporsional.

Perempuan pesisir adalah kelompok wanita pada usia produktif yang menjadi bagian dari masyarakat pesisir, yang berdomisili di pesisir pantai kepulauan Indonesia atau di pulau-pulau terluar, dengan ciri desa-desa pantai yang relatif tradisional, serta memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Kehidupan dan perekonomian yang diusahakan perempuan pesisir tidak terlepas dari tradisi komunitas yang melingkupinya. Masyarakat pesisir secara umum memiliki profesi, sebagai nelayan, pembudidaya ikan, udang galah, pengolah dan pedagang hasil laut, mengusahakan pertanian dan pengolahan hasil pertanian dengan jenis tanaman pantai.

Peluang kerja dan pengembangan di sektor perekonomian bagi perempuan pesisir sesungguhnya terbuka luas. Terlebih-lebih kelebihan alam pesisir yang memiliki daya tarik wisata juga memberikan ruang yang lebar bagi perempuan untuk membuka usaha ekonomi produktif. Dengan adanya potensi kawasan wisata religius, alam pantai dan perikanan laut, produksi pertanian dan perikanan tinggi, nilai tambah industri tinggi, dilalui jalur jalan lintas selatan, sarana pendidikan cukup baik. Akan tetapi daya serap tenaga kerja wanita selama ini masih belum dapat menempatkan perempuan pada posisi strategis.

Bahkan dengan beban masalah berupa tanah porous, kepemilikan tanah rendah, pantai kumuh, bangunan liar, infrastruktur kurang terencana, jalan kabupaten belum mantap, listrik dan

informasi kurang, rasio rumah/KK rendah, sarana perdagangan sedang-rendah, pencemaran air tanah di pantai, kurang vegetasi pantai, eksploitasi galian golongan C kurang terkendali, menurunnya satwa langka, rawan banjir, nilai tambah dan jumlah unit usaha rendah yang terjadi di Kretek dan Sanden, penduduk miskin sedang, penganggur tinggi di Srandakan dan Kretek, Kondisi kesehatan rendah khususnya di Kretek, adanya penyandang masalah sosial. Hal ini semakin mempersempit peluang perempuan untuk berkembang.

Tenaga kerja perempuan sebagai unsur yang perlu mendapat perhatian. Perempuan merupakan tenaga kerja yang dapat dikembangkan dan memiliki sifat inheren yang memungkinkan untuk mendukung berlangsungnya suatu usaha ekonomi produktif. Dengan dikembangkannya tenaga kerja perempuan, sangat memungkinkan bagi tumbuhnya sektor usaha ekonomi produktif yang lebih mengakar. Di samping usaha tersebut menjadi penyumbang wadah baru bagi angkatan kerja, juga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan income per capita daerah yang secara otomatis juga mengurangi konsentrasi kemiskinan.

Perempuan memiliki potensi terpendam berupa sifat inheren yang berseberangan dengan sifat laki-laki. Adapun perbedaan antara sifat bawaan laki-laki dan perempuan adalah, jika laki-laki tersusun atas otot lurik sehingga bersifat kuat, kekar dan perkasa, maka perempuan terdiri atas otot polos yang menjadikan perempuan bersifat lebih lemah, halus tetapi mampu bekerja dengan tempo lebih lama. Sifat bawaan perempuan yang rajin, hati-hati, teliti, cermat, serta ulet. Hal ini menjadikan perempuan sangat cocok untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi lama serta perlu ketekunan.

Bidang ekonomi produktif merupakan lahan yang sesuai untuk perempuan. Apalagi usaha ekonomi produktif tidak mengharuskan perempuan meninggalkan 100% dari tugas domestik dalam perawatan anak, pekerjaan rumah tangga. Usaha ekonomi produktif dapat dilakukan dalam lingkungan rumah, seperti home industri merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang relevan. Perempuan pada dasarnya mempunyai potensi yang sangat penting dalam usaha ekonomi produktif keluarga. Hal ini seperti terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setyawati (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tidak sedikit dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Konsentrasi tenaga kerja perempuan pesisir memperlihatkan kecenderungan pada sector usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal. Kondisi tersebut juga nampak pada tenaga kerja perempuan pesisir di Kabupaten Bantul yang pada hakikatnya banyak terserap dalam tenaga kerja rumah tangga dan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif yang didukung oleh tenaga kerja perempuan perlu memperoleh porsi perhatian yang penting. Pengembangan kemampuan

tenaga kerja perempuan di bidang ekonomi produktif diperlukan untuk memberikan efek ganda pada tumbuhnya swadaya dalam mencukupi kebutuhan wilayah. Di samping itu sebagai lokasi wisata alam (pantai) Kuwaru harus didukung oleh sektor ekonomi produktif yang mampu mengolah dan mengubah potensi alam menjadi karya inovatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Potensi wilayah yang tersedia seperti hasil bumi, tambang, potensi laut selatan merupakan kekayaan yang hendaknya diolah sehingga menambah daya tarik wisata. Di samping itu dengan bertambahnya nilai ekonomi suatu sumber daya alam akan mendorong berkembangnya pembangunan wilayah. Perlu diketahui bahwa penguasaan perempuan ekonomi produktif seringkali sangat rendah. Untuk itulah perempuan perlu diberdayakan supaya mampu meningkatkan kemampuan usaha maupun pengelolaan usaha.

Banyak perempuan pesisir di Pantai Kuwaru, Kabupaten Bantul yang telah bergerak di bidang usaha ekonomi produktif. Seperti usaha kerajinan, home industri dalam pengolahan hasil pantai dan perdagangan. Namun karena usaha yang dilakukan tidak mempergunakan teknologi yang memadai maka mengalami kesulitan dalam meningkatkan volume usaha atau produktivitasnya rendah. Jika volume usaha tidak meningkat maka tidak akan mengalami peningkatan pada pendapatan. Di samping itu dengan teknologi yang terbatas, usaha tidak memperoleh hasil yang berkualitas. Kualitas yang rendah menjadikan hasil usaha ekonomi produktif dimaksud kurang mampu bersaing dengan wilayah yang lain. Dan selanjutnya produksi yang dihasilkan sulit menembus pasaran regional. Untuk itulah perempuan perlu diberdayakan dalam kemampuan melakukan usaha ekonomi produktif terutama dengan mengembangkan .

Tidak berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perempuan seringkali disebabkan oleh keterbatasan kemampuan organisasi dan manajemen yang dimiliki. Dengan adanya pengorganisasian serta manajemen yang tidak teratur menyebabkan tidak adanya sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi yang tertib. Dengan demikian pengelolaan menjadi sering tidak termonitor secara pasti. Di samping itu sistem manajemen yang tercampur dengan manajemen keluarga menjadikan rumah tangga usaha produktif sering dimanfaatkan untuk menutup kepentingan keluarga. Oleh karena perempuan sebagai pengelola usaha ekonomi produktif perlu diberdayakan pada kemampuan pengorganisasian dan manajemen usaha.

## **1.2. Perumusan Masalah :**

Perempuan merupakan bagian dari komunitas yang sangat rentan akan permasalahan berkenaan dengan peluang kerja. Terdapat berbagai masalah mengenai keterbatasan perempuan untuk memperoleh sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor: pertama, dari pihak perempuan sendiri tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang cukup memadai, kedua, pihak institusi pemilik pekerjaan yang seringkali mempersyaratkan kompetensi yang relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan perempuan dengan kompetensi yang rendah amat sulit untuk menjangkau.

Akibat banyaknya perempuan yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal, maka seringkali sektor industri rumah tangga, perdagangan bahkan rumah tangga itu sendiri memperoleh luberan tenaga kerja. Perempuan merupakan tenaga kerja yang seringkali harus masuk ke dalam sektor home industri maupun pekerja rumah tangga. Tanpa disadari masuknya luberan tenaga kerja perempuan ke dalam sektor-sektor informal seperti ini telah mengakibatkan permasalahan, seperti rendahnya pendapatan, ketidak mapanan perempuan.

Rendahnya kualitas perempuan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Pendidikan rendah mengakibatkan sempitnya penguasaan pengetahuan dan kreativitas berpikir. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan perempuan menjadi warga kelas dua setelah laki-laki. Rendahnya kualitas perempuan juga ditandai oleh keterbatasan penguasaan keterampilan oleh perempuan. Sementara itu keterampilan merupakan salah satu kompetensi yang dapat digunakan untuk meraih peluang kerja.

Akibat kualitas perempuan rendah tersebut menjadikan perempuan mengalami kesulitan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sementara tuntutan kontribusi perempuan dalam pembangunan semakin penting dari waktu ke waktu. Dengan dicanangkannya konsep kesetaraan gender merupakan peluang yang besar bagi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan, proses maupun pengawasan dan evaluasi pembangunan. Namun terbentur oleh keterbatasan kualifikasi perempuan tersebut, maka hanya sedikit yang terserap ke dalam kancah pembangunan.

Jika suatu Kabupaten menginginkan wilayahnya mengalami kemajuan signifikan, dengan melibatkan sebanyak mungkin perempuan dalam pembangunan, maka harus mengusahakan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Melalui pemberdayaan perempuan tersebut akan tercetak kader-kader perempuan pembangun yang sangat kreatif.

Perempuan pesisir memiliki tempat tinggal di sekitar pantai dan dicirikan oleh kinerja perekonomian yang bersifat khas. Dengan bertumpu pada pesisir sebagai lingkungan tempat

tinggal, maka aktivitas perekonomian sehari-hari tidak bisa lepas dari pola dan kebiasaan kemaritiman. Keterikatan masyarakat dengan laut merupakan ciri tersendiri dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Laut sebagai sumber daya perekonomian, dengan ragam kekayaan ikan serta biota lain yang tidak terbatas, sebagai .potensi tak ternilai, akan tetapi belum dapat memberikan kesejahteraan yang diharapkan.

Pendidikan ketrampilan kerja, yang dikemas dalam pelatihan-pelatihan sangat diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan/ketrampilan khusus yang relevan dengan aktivitas perekonomian. Dengan demikian perempuan pesisir dapat mengaktualisasikan dirinya dalam melancarkan roda perekonomian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

**Usaha pemberdayaan perempuan yang dicanangkan hendaknya mampu mengarahkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perempuan dewasa ini dan kurun waktu mendatang. Oleh karena itu program yang direncanakan sebagai upaya pemberdayaan perempuan selaras dengan kebutuhan, dan perkembangan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan untuk pengembangan manajemen komoditas yang berbasis potensi lokal?**

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Representasi Paradigma Pembangunan Kemiskinan

Gambaran kemiskinan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa angka kemiskinan sangat tinggi. Bertolak dari kondisi tersebut maka pemerintah telah melakukan pembangunan dari periode ke periode. Secara simultan pembangunan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengandalkan pendekatan paradigmatis dari satu paradigma ke paradigma lainnya. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

- a. Th 1970-an hingga 1990-an lebih banyak berkiblat pada pendekatan ekonomi. Sebagaimana telah diketahui dari pendekatan pertumbuhan (*economic growth development*), tetesan ke bawah (*trickle down effect*), untuk menciptakan kemajuan di bidang ekonomi kala itu sangatlah dominan. Ironisnya melalui pendekatan tersebut Negara-negara berkembang justru kandas di tengah jalan. Indonesia kenyataannya telah terjebak oleh paradigma tersebut. Sangat naif jika pertumbuhan harus mengorbankan pemerataan. Diabaikannya pemerataan, semakin menciptakan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Berkenaan dengan teori ini Sigit dalam Pangestu dan Setiati (1997: 172) menyatakan bahwa ajaran teori ini dipandang sudah usang, penonjolan infrastruktur fisik justru memunculkan ketimpangan sosial ekonomi secara meluas.
- b. Mulai th 1990-an ditiupkan paradigma baru yang lebih *humanize*. Bermula dari pengalaman pahit pada pendekatan pertumbuhan, maka pendekatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pembangunan manusia ini lebih memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan strategi *sustainable development, community based development, people centered development*. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi.

Bertolak dari model pembangunan yang *humanize* tersebut maka dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks *good governance* ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu :

- a. masyarakat sipil
- b. pemerintah



c. swasta.

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa SDM/masyarakat menjadi pilar utama yang harus diberdayakan. Akan tetapi usaha meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM bukan merupakan pekerjaan yang sederhana. Dewasa ini kebijakan dan program yang dilakukan masih terbentur berbagai kendala, khususnya permasalahan kemiskinan perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian aplikasi konsep pembangunan SDM tersebut tidak terlepas dari adanya kemiskinan penduduk di perkotaan dan di pedesaan itu sendiri. Adapun masyarakat yang dimaksud meliputi laki-laki dan perempuan secara seimbang.

## **2.2. Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Gender di Bidang Usaha Ekonomi produktif**

Perempuan menjadi bagian penting dari struktur masyarakat sipil yang harus mendapatkan porsi dalam pembangunan. Begitu pula dengan pembangunan perekonomian lokal, perempuan yang terbukti memiliki kapling di sektor usaha ekonomi produktif perlu diberikan proses pemberdayaan yang memadai. Perempuan sebagai bagian dari pilar pembangunan berbasis pada manusia dan masyarakat dewasa ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Jika suatu wilayah menghendaki terjadinya kesetaraan gender sebagaimana telah dicanangkan maka perempuan sudah semestinya memperoleh proses pemberdayaan.

Kesetaraan gender di bidang ekonomi produktif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh peluang usaha. Dengan demikian perempuan menjadi lebih berpotensi untuk memperoleh sumber pendapatan yang memberikan jaminan hidup lebih layak. Di samping itu dengan adanya peluang yang setara di bidang ekonomi produktif memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikan kemampuan berproduksi. Hal ini menjadi penting bagi terwujudnya eksistensi dan pengakuan jati diri perempuan dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan di bidang usaha ekonomi produktif menjadikan perempuan sebagai bagian yang mampu menyumbangkan darma baktinya terhadap pembangunan wilayah. Dengan demikian perempuan menjadi penyokong terbentuknya civil society yang diharapkan.

## **2.3. Langkah dan Pendekatan Pemberdayaan yang Tepat**

Paradigma baru yang disampaikan untuk mengoreksi paradigma yang sudah ada adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat diberikan hak untuk

mengelola sumberdaya dalam rangka melaksanakan pembangunan. Hadirnya paradigma ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat miskin juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain. Inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Dewasa ini *good governance* telah didengung-dengungkan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tataran pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. Pengertian yang berkembang tentang *good governance* sebagaimana disampaikan oleh Bank Dunia dalam Mardiasmo (2002 : 23) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi, investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dari pengertian ini dapat diambil gagasan pokok dari *good governance* adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan citra baik pemerintah khususnya dalam lingkup pengendalian sistem pembangunan. Berbeda dengan pemikiran UNDP yang lebih menekankan adanya keberpihakan pada masyarakat sipil dalam penyelenggaraan Negara. Pada tataran ini maka fokus UNDP di dalam memandang *good governance* tersebut adalah penekanan adanya *sharing* kekuasaan dan daya kemampuan dalam penyelenggaraan Negara. Secara eksplisit maka UNDP menyatakan istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan dalam pembangunan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa langkah yang harus ditempuh adalah pembentukan keseimbangan peran dan fungsi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan dengan mendudukan masyarakat pada porsi yang penting. Senada dengan pernyataan di atas Thoha dalam Sulistiyani (2003:21) yang dimaksud *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sector swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.

Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi bagian penting dalam *good governance* tersebut. Dalam konteks *good governance* pemerintah diposisikan sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggungjawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat. Bentuk ideal relasi yang ingin diwujudkan adalah “kemitraan” antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi dan LSM. Dengan demikian konsep *governance* merujuk pada tiga pilar utama, yaitu *public governance*, *corporate governance* dan *civil society*.

#### **2.4. Pemberdayaan Masyarakat**

Bagi masyarakat menerima peran dan posisi yang demikian ideal bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan di segala segi, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penelenggaraan pembangunan.

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk

memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996) menyatakan bahwa; pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Menurut Paul Freire dalam Keban & Lele (Keban dan Lele, 1999) pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.

Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Di samping itu NGO merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintah.

Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan *good governance* dalam suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Ada dua pendekatan yang berkembang yaitu *zero sum* dan *positive sum*. Pendekatan *zero sum* menyatakan tidak memperhatikan adanya regenerasi, sedangkan *positive sum* mementingkan adanya proses regenerasi dalam pembangunan.

## 2.5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dan "*empower*" menurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung pengertian *pertama* adalah *to give power or authority to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang ke dua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengasentuasikan sifat-sifat "*people centered, participatory empowering sustainable*". Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Konsep ini dikembangkan dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya seperti "*alternative development*" yang menghendaki "*Inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and inter-generational equity*". Ini berarti perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suarni atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini dimungkinkan karena adanya persamaan gender, persamaan intergenerasi, ditingkatkannya kehidupan berdemokrasi seiring dengan perkembangan jaman.

Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuan tidak cukup

hanya "ditandai" dalam bentuk uang, tenaga dan *in-natura* lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Dalam proses pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan nilai-nilai demokrasi pada program pemberdayaan perempuan sama dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya berupa dana (modal, sumberdaya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan).

Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika pria dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan.

Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuan mitra sejajar pria dengan menggunakan pendekatan dua arah perempuandan pria yang saling menghormati sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian. Pemberdayaan perempuan dapat diartikan pula sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, sehingga dapat menyalurkan pendapatnya, mampu mengungkapkan kebutuhannya, dapat menganalisis dan turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi segala program yang berkaitan dengan dirinya.

Konsep gender muncul dan berkembang karena adanya ketidakpuasan dengan konsep jenis kelamin yang hanya menggambarkan laki-laki dan perempuan semata-mata dari segi biologis. Dengan meningkatnya kesadaran bahwa peran perempuan perlu dilihat dalam konteks masyarakat, dan dalam hubungan dengan kaum laki-laki, para perencana dan praktisi mengemukakan pendekatan gender dan pembangunan (*Gender and development*) atau GAD sebagai konsep, strategi, dan perencanaan yang lebih tepat. Konsep gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, dan perilaku laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemahaman bahwa identitas, peran, fungsi, pola perilaku, kegiatan, dan persepsi baik tentang perempuan maupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dengan demikian, penggambaran perempuan dan laki-laki berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan aspek biologis saja.

## 2.6. Cakupan Pemberdayaan

Yang perlu dipikirkan dalam proses pemberdayaan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif adalah bagaimana langkah pemberdayaan harus dilakukan, serta cakupan pemberdayaan yang sebaiknya dikembangkan. Hal ini perlu diperhitungkan supaya pemberdayaan dapat berjalan secara efektif serta dapat lebih mengena pada kelompok sasaran yang dimaksud. Adapun tahapan dan cakupan pemberdayaan secara teoritis dapat diamatai pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1. TAHAPAN PEMBERDAYAAN KAP  
DENGAN PENDEKATAN AFEKTIF, KOGNITIF, PSIKOMOTORIK DAN KONATIF**

TAHAPAN AFEKTIF	TAHAPAN KOGNITIF	TAHAPAN PSIKOMOTORIK	TAHAPAN KONATIF
BELUM MERASA SADAR PEDULI	BELUM MEMILIKI WAWASAN PENGETAHUAN	BELUM MEMILIKI KETRAMPILAN DASAR	TIDAK BERPERILAKU MEMBANGUN
TUMBUH RASA KESADARAN & KEPEDULIAN	MENGUASAI PENGETAHUAN DASAR	MENGUASAI KETRAMPILAN DASAR	BERSEDIA TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN
MEMUPUK SEMANGAT KESADARAN & KEPEDULIAN	MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN DASAR	MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DASAR	BERINISIATIF UNTUK MENGAMBIL PERAN DALAM PEMBANGUNAN
MERASAMEMBUTUHKAN KEMANDIRIAN	MENDALAMI PENGETAHUAN PADA TINGKAT YG LEBIH TINGGI	MEMPERKAYA VARIASI KETRAMPILAN	BERPOSISI SECARA MANDIRI UNTUK MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGAN

Sumber: Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004: 84-85.

**Dalam rangka memberdayakan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif diperlukan langkah-langkah konkrit, sehingga tahapan pemberdayaan serta cakupannya menjadi semakin jelas.**

**Upaya memberdayakan perempuan menyangkut pribadi yang memiliki kapasitas yang berbeda, sehingga perlu diperhitungkan dengan cermat. Sesuai dengan tabel tersebut di atas, maka pemberdayaan perempuan yang dimaksud harus menyentuh pada keempat aspek secara bertahap.**

## **2.7. Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pantai**

Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal.

Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

### **2.7.1. Pendekatan struktural.**

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :



#### **a. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.**

Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara perekonomian masyarakat, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk menjaga dari kerusakan lingkungan.

Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap potensi perairan pesisir dan laut untuk transportasi dan pariwisata perlu ditingkatkan. Tujuan untuk kegiatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan sektor seperti kegiatan pariwisata dapat mendorong kegiatan masyarakat untuk ikut serta melindungi lingkungan terutama apabila pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam sangat diperlukan, karena sebagian besar masyarakat pantai telah dan masih akan bergantung pada sumber daya alam.

#### **b. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ekonomi.**

Pengembangan aksesibilitas masyarakat pantai terhadap sumber daya ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan perkreditan. Peluang usaha selain sektor perikanan yang perlu dibuka lebih luas adalah dibidang pertanian, kerajinan, peternakan dan jasa angkutan. Hal ini penting dalam rangka membuka kesempatan masyarakat untuk tidak hanya bergantung secara langsung pada sumber daya alam, tetapi juga sekaligus mengurangi beban alam. Guna mendukung langkah tersebut, maka perlu dikembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap perkreditan.

Sistem perkreditan yang mampu memberikan pelayanan dan dorongan bagi masyarakat, sangat diperlukan. Perkreditan tersebut perlu lebih diarahkan kepada upaya pengembangan usaha yang tidak terlalu mengandalkan sumber daya alam utama di wilayah pesisir dan laut, yaitu mangrove. Karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem perkreditan yang mampu mendorong tumbuhnya sektor usaha alternatif.

#### **c. Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Proses Pengambilan Keputusan.**

Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan

pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan bottom up dan top down planning. Pada tingkat perencanaan masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya. Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Di lain pihak, top down planning diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.

#### **d. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi.**

Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi sumber daya alam serta wilayah pesisir dan laut. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini tergantung secara ekonomis pada sumber daya alam, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat.

Guna meningkatkan aksesibilitas informasi dari masyarakat, dapat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, unsur-unsur pemerintah dan pihak terkait serta stakeholders.

#### **e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.**

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan pembentukan embrio lembaga-lembaga sosial dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apabila lembaga serupa telah ada sebelumnya, maka lembaga-lembaga tersebut perlu diberdayakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan jaringan sosial antara lembaga-lembaga serupa baik dalam lingkungan desa, antar desa, maupun antar kecamatan. Selain itu, pemberian peranan yang lebih kepada lembaga-lembaga tersebut dalam proyek-proyek pembangunan akan makin memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bersangkutan.

#### **f. Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.**

Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).

#### **g. Pengembangan Jaringan Pendukung.**

Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat mendorong terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem dialog antar instansi

terkait dan antara instansi-instansi tersebut dengan masyarakat. Kebiasaan mengkomunikasikan gagasan dan rencana kegiatan setiap instansi dengan instansi lain merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan. Untuk itu, pelembagaan sistem koordinasi antar stakeholders perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi dilingkungan pemerintah.

### **2.7.2. Pendekatan Subyektif.**

Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :

#### **a. Peningkatan Pengetahuan Dan Wawasan Lingkungan.**

Pengetahuan dan wawasan lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengawasannya dibanding dengan masyarakat diluar wilayah. Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparatur dusun, desa, dan kecamatan serta masyarakat luas.

#### **b. Pengembangan Keterampilan Masyarakat.**

Peningkatan keterampilan praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan jajaran pemerintah ditingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dan keterampilan tentang

upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan keterampilan tersebut akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat pantai dalam pengelolaan pesisir dan laut.

### **c. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.**

Pengembangan kapasitas masyarakat diperlukan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya kemampuan dan peluang masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau lembaga sosial. Sasaran utama program ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.

### **d. Pengembangan Kualitas Diri.**

Kualitas masyarakat pantai perlu ditingkatkan untuk menjawab dua tantangan. Tantangan pertama adalah, upaya mengatasi masalah perekonomian, baik untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pokok, maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. Tantangan kedua adalah, upaya mengatasi masalah kerusakan alam, yaitu untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut sebagai akibat makin meningkatnya aktifitas manusia di wilayah tersebut. Pengembangan diri tersebut termasuk pengembangan kualitas manusia, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang kian beragam.

Peningkatan kualitas manusia diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumber-daya alam yang tidak efisien. Program pengembangan kualitas manusia ini selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan juga dengan cara membentuk kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, baik di lingkungan desa pantai maupun di luar, bahkan antar wilayah. Penyiapan tenaga kerja untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan wilayah lain disekitarnya perlu dilakukan secara proaktif dengan dilandasi oleh pandangan jauh ke depan.

### **e. Peningkatan Motivasi Masyarakat Untuk Berperanserta.**

Motivasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta mereka secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, upaya pelibatan masyarakat dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan terus. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan aspek-aspek

yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi mempunyai arti yang strategis untuk mendorong masyarakat melibatkan diri dalam upaya perlindungan sumberdaya alam.

#### **f. Penggalian Dan Pengembangan Nilai Tradisional Masyarakat.**

Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.

Dengan demikian, strategi pengembangan masyarakat pantai dalam meningkatkan kemandirian Daerah, sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pantai dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang dengan tujuan yang menitikberatkan pada :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan.
3. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

### **2.8. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Menurut Bengen, D.G. (2001), Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Namun untuk lebih operasional, definisi populasi masyarakat pesisir yang luas ini tidak seluruhnya diambil tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan

serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil.

Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai. Dalam kasus tertentu, memang mereka dapat pergi jauh dari pantai dengan cara bekerjasama sebagai mitra perusahaan besar. Namun usaha dengan hubungan kemitraan seperti tidak begitu banyak dan berarti dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang begitu banyak.

Sunyoto Usman (2003) mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini tidak akan dapat lepas dari pengaruh globalisasi yang melanda dunia. Persolan politik dan ekonomi tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai persoalan nasional. Keterkaitan antar negara menjadi persoalan yang patut untuk diperhitungkan. Masalah ekonomi atau politik yang dihadapi oleh satu negara membawa imbas bagi negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi masalah internasional.

Menurut Soejadi (2001), kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan *alienasi* masyarakat dari faktor produksi oleh penguasa (Priyono, 1996).

Menurut Maria Fraskho, (2000), konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logik sebagai berikut; (1). Proses pemusatan

kekuasaan terbangunan dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2). Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3). Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif, untuk memperkuat legitimasi; (4). Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum sistem politik dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

## **2.9. Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Peran perempuan di sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sektor perikanan, tidak dapat disangsikan lagi, karena memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Meskipun perannya sangat strategis, posisi perempuan masih dan cenderung terus termarginalkan terutama dalam akses dan kontrol sumberdaya dan manfaat seperti : kredit, teknologi, informasi dan kesempatan menambah pengetahuan. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan pemerintah dalam berbagai kegiatan pertanian yang belum memperhitungkan perempuan.

Pada usahatani padi dan palawija, peran aktif perempuan lebih besar dibanding laki-laki, khususnya pada kegiatan penanaman, penyiangan, pascapanen dan pemasaran, namun akses dan kontrol sumberdaya lebih didominasi oleh laki-laki. Hal ini memerlukan solusi lebih lanjut terutama dalam hal optimalisasi peran perempuan, agar perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan pertanian dan perikanan selanjutnya dapat memperhitungkan dan memberi peran optimal kepada perempuan. Khususnya di bidang perikanan, walaupun dari kegiatan penangkapan kontribusi perempuan tidak pernah terdengar, namun dari kegiatan pemasaran dan pengolahan pascatangkap kontribusi perempuan relative dominan.

Ketidakadilan gender dalam masyarakat perdesaan secara factual sangat menonjol. Untuk pekerjaan yang sama di bidang pertanian, perempuan sering memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Selain itu laki-laki lebih mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan hanya berada di sektor domestik yang secara ekonomis dianggap kurang strategis. Bahkan untuk berbagai pekerjaan yang secara tradisional merupakan pekerjaan perempuan. Jika teknologi mekanis sudah masuk ke dalamnya dan secara ekonomis dianggap lebih menguntungkan, maka biasanya laki-laki akan mengambil peran tersebut dan menggantikan peran perempuan. Dengan demikian insentif ekonomi



tampaknya memegang peranan penting dalam menentukan peran gender (Harsoyo, 1999). Untuk itu ketrampilan perempuan perlu ditingkatkan agar dapat bekerja dengan kualitas yang sebanding, bahkan lebih baik dengan yang dilakukan laki-laki.

Erat kaitannya dengan ketrampilan tersebut adalah kegiatan pengolahan ikan di daerah pantai. Kegiatan pengolahan ikan pascatangkap bertujuan untuk mempertahankan kualitas ikan agar dapat dikonsumsi dalam waktu lebih lama. Selain itu, pengolahan juga bertujuan untuk menghasilkan produk baru yang karakteristiknya jauh berbeda dari ikan segar.

Menurut Sajogyo (1979) perempuan memiliki tiga peranan, yaitu : (1) penyumbang tenaga dalam pekerjaan rumah tangga seperti memelihara anak, memelihara rumah, pengaturan konsumsi rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan serta mencari nafkah di luar rumah tangga; (2) pengambilan keputusan; (3) di luar rumah tangga sebagai pendukung beberapa lembaga/organisasi sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ketiga peranan ini disebut dengan peran ganda perempuan. Terdapat tiga peranan utama sekaligus (*triple roles*) yang dilakukan oleh perempuan, yaitu sebagai *breeder*, *leader*, dan *producer*. Peranan pertama berkaitan dengan pemeliharaan atau pengasuhan bayi dan anak-anak. Peranan kedua berhubungan dengan tanggung jawab eksklusif perempuan untuk memberi makan manusia dari segala usia khususnya seperti pada anggota rumah tangga. Peran ketiga berkaitan dengan kegiatan memproduksi sejumlah material untuk kebutuhan konsumsi domestik, menanam dan mengumpulkan bahan makanan, mencari air dan kayu bakar, membuat perkakas domestic dan pakaian, melakukan perlindungan keluarga, serta menciptakan objek-objek material yang lain (Buolding 1981 diacu dalam Kusnadi 2001).

Peran perempuan dalam keluarga dan rumah tangga suatu system terkecil dalam masyarakat. Berdasarkan pengorganisasian sosial ekonomi tradisional, maka Sajogyo (1983) mengemukakan dua pola peranan perempuan : (1) pola dimana perempuan hanya berperan dalam pekerjaan rumah tangga, (2) pola dimana perempuan punya dua peranan yaitu peranan dalam pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga. Pada tingkat rumah tangga perempuan tidak begitu tersisih dari laki-laki dalam hal bertanggungjawab di bidang pemeliharaan rumah tangga. Bahkan perempuan ada yang ikut berperan dan bertanggungjawab di bidang reproduksi. Ternyata perbedaan peran pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan sangat bervariasi antar desa, antar situasi maupun antar individu pada strata yang sama. Di tingkat masyarakat, perempuan berperan dalam kegiatan informal, dan laki-laki pada kegiatan formal (white dan Hastuti, 1980). Peranan perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan dapat diukur dengan curahan waktu dan pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan. Konsep nilai waktu pada dasarnya melalui pengertian “nilai pekerjaan”, dimana

sumbangan laki-laki dan perempuan anggota rumah tangga dapat dibandingkan dan dapat diukur. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam perekonomian rumah tangga di pedesaan, hendaknya melalui pendekatan analisa “nilai waktu pekerjaan”. Memberi nilai terhadap waktu maka pekerjaan rumah tangga yang secara ekonomis tidak menghasilkan imbalan kerja dapat diberi nilai yang wajar (Sajogyo, 1983).

Secara umum, dalam masyarakat nelayan pesisir nampaknya perempuan memegang peranan yang amat penting untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya. Selain harus bertanggungjawab terhadap urusan domestik atau rumah tangga, mereka juga harus membantu tugas atau pekerjaan suami dan terlibat aktif mencari nafkah untuk menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga (Kusnadi, 2001). Ragam pekerjaan yang bisa dimasuki oleh istri-istri nelayan di Indonesia untuk memperoleh penghasilan adalah menjadi pengumpul pengolahan hasil ikan, pembersih perahu (kapal) yang baru mendarat, pengumpul nener, pekerja pada perusahaan penyimpanan udang beku, atau industri rumah tangga untuk pengolahan hasil ikan, pembuat jarring, pedagang ikan eceran, pedagang (ikan) perantara, dan pemilik warung. Pada umumnya ragam pekerjaan tersebut masih terkait dengan kegiatan perikanan (Kusnadi, 2000).

## **2.10. Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga Nelayan**

Dewasa ini status dan peranan perempuan banyak mengalami perubahan. Berbagai tindakan yang dilakukan sebagai upaya pembebasan perempuan. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seharusnya memperhatikan kondisi perempuan maupun laki-laki, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang dipilih dapat meningkatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Farihah dan Sunyoto Usman, 2002).

Perempuan saat ini banyak yang melibatkan diri pada sektor perdagangan. Menurut Stoler daya tarik pada sektor perdagangan oleh perempuan dikarenakan pada sektor ini mampu memberikan sumber pendapatan secara teratur. Di samping itu sektor perdagangan juga memberikan kesempatan yang sangat besar bagi keterlibatan kaum perempuan karena pekerjaan di sektor tersebut sesuai dengan kemampuan fisik alamiah yang dimiliki oleh perempuan (Suyanto, 1995).

Bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri, di satu pihak perempuan dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan pihak lain perempuan dapat memperoleh penghasilan sendiri, dengan demikian perempuan dapat memenuhi kebutuhannya

bahkan dapat menyumbangkan pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan perempuan mempunyai kemandirian di bidang perkonomian.

Perempuan yang terlibat dalam sektor perdagangan (*public role*) pada umumnya memiliki posisi *bargaining* yang lebih tinggi daripada perempuan yang hanya terlibat dalam sektor domestik (*domestic role*). Perempuan yang bekerja dan memiliki sumber pendapatan sendiri, tidak saja memiliki otonomi dalam mengelola pengeluaran pribadinya, mereka juga dapat lebih membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya (Suyanto, 1996).

Dilihat dari pendekatan teori sosial konflik, menurut Engels keluarga adalah nuklir berdasarkan pemilikan pribadi sebagai penindasan perempuan yang paling parah. Engels menganalogikan bahwa hubungan suami istri dalam keluarga sebagai hubungan antara kelas kapitalis dan kelas proletar. Teori Engels tersebut dijadikan Collins sebagai dasar untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang mengakibatkan kaum laki-laki sebagai borjuis dan perempuan sebagai kaum proletar yang tertindas (Megawangi, 1999).

Menurut perspektif konflik, adanya hubungan vertikal dalam keluarga antara suami istri seperti di atas, maka potensial untuk timbulnya konflik yang berkepanjangan, dan dianggap hubungan keluarga seperti itu tidak ideal. Keluarga yang ideal menurut perspektif konflik adalah adanya hubungan horizontal, sehingga posisi perempuan sendiri mampu menjadi individu yang otonom dan dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri.

Paradigma sosial konflik menganggap bahwa keluarga bukan sebuah kesatuan yang normative (hamonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik, di mana ada anggapan bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial opresif.

Menurut para feminis marxis dan sosialis, institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama. Sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Megawangi, 1999).

Lasser Blumberg (1984) berpendapat bahwa kemandirian pada perempuan mungkin cukup untuk mencapai kesetaraan kekuasaan dan status mereka dalam perkawinan, rumah tangga dan masyarakat secara luas. Blumberg menjadikan perempuan Kibbutz menjadikan *test case* bagi teorinya. Namun dari hasil pengamatannya ia mengambil kesimpulan bahwa meskipun perempuan Kibbutz dan laki-lakinya mungkin seimbang dalam rumah tangga, akan

tetapi perempuan masih dipandang memiliki ketidakberdayaan politik disbanding dengan laki-laki (Lorber, 1991).

Sedangkan Geertz menggambarkan pula bahwa dalam keluarga Jawa (*the nuclear family*) ditemukan adanya peranan perempuan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai istri, perempuanlah yang mengelola keuangan keluarga, walaupun secara resmi suami yang memutuskan setelah berunding dengan istrinya, kemungkinan bahwa suami yang mempunyai kemauan keras dalam hubungan suami istri, mempunyai status sama nilai, karena kenyataannya keluarga dimana suami mempunyai kekuasaan yang paling besar jarang ditemukan (Geertz, 1961). Dengan demikian Geertz menyatakan bahwa posisi perempuan dalam keluarga Jawa sangat kuat (Sajogyo, 1983).

Besarnya dominasi peranan istri dalam rumah tangga terhadap kegiatan perekonomian dapat mempengaruhi posisi istri sebagai mitra sejajar dalam keluarga. Dengan demikian peranan ekonomi istri sama pentingnya dengan suami (komplementer), jadi tidak sekedar sulementer (tambahan). Besarnya peranan perempuan dalam rumah tangga mempengaruhi kedudukan istri dalam keluarga.

## **2.11. Relasi Kuasa Laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Pesisir**

Masyarakat sekitar pesisir sebagian besar bekerja di sektor perikanan. Keterlibatan istri masyarakat yang bekerja di sektor perikanan seperti nelayan pada kegiatan ekonomi, ternyata tidak menjamin mereka mempunyai legalitas atau status pekerjaan ini (Andriani, 2008). Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia melainkan juga pada Negara-negara lain. Posisi istri nelayan juga tidak jelas, karena mereka tidak mempunyai status pekerjaan. Status mereka lebih ditentukan oleh posisi atau status pekerjaan suami/nelayan. Posisi struktural suami lebih menentukan posisi structural istri pada masyarakat nelayan.

Berbagai hasil penelitian pada masyarakat nelayan menunjukkan bahwa posisi perempuan nelayan golongan menengah dan miskin cenderung rendah, sekalipun kontribusi sosial ekonomi mereka cenderung lebih besar. Bahkan curahan waktu yang diberikan oleh istri nelayan jauh lebih lama, dibandingkan dengan suami mereka dan seringkali memiliki beban ganda (*double burden*). (Acheson, 1981; Mubyarto et al, 1984; Andriati, 1990 dan 1993; Setyawati, 2005).

Para istri nelayan cenderung merespon keadaan ini dengan ekspresi kurang puas. Ekspresi ini berkaitan terhadap anak-anak mereka, yaitu anak-anak laki-laki tidak menjadi nelayan, anak perempuan tidak kawin dengan nelayan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar anak nelayan, baik laki-laki maupun perempuan cenderung menikah dengan anak

nelayan, karena kegiatan social ekonomi mereka relative berbeda dengan kelompok masyarakat lain, mengingat keahlian kenelayanan telah disosialisasikan sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara itu, posisi perempuan nelayan kaya cenderung tinggi, sebagaimana dimanifestasikan ke dalam bentuk dominasi dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kegiatan sosial ekonomi, baik pada keluarga sendiri maupun keluarga buruh nelayan.

Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa posisi dan/atau status perempuan lebih ditentukan konstruksi social tentang peran gender. Ada dugaan bahwa konstruksi gender ini terkontaminasi oleh *bias* laki-laki dan dilingkupi oleh struktur patriarkhal. Untuk itu, konstruksi gender sebaiknya ditempatkan pada perspektif yang lebih dinamis.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah (2001) sebagai berikut :

“... gender yang menunjuk pada konstruksi sosial atas laki-laki dan perempuan, khususnya dengan menitikberatkan pada ‘relasi’, sesungguhnya merupakan entitas yang dinamis yang dapat mengalami redefinisi dan rekonseptualisasi berdasarkan ruang dan waktu. *Setting* sosial seperti dunia perdagangan atau dunia apapun tempat perempuan berkiprah merupakan salah satu ruang yang sangat perlu untuk dijelaskan. Namun demikian, realitas gender yang dinamis itu cenderung dimatikan pada suatu titik pemaknaan akibat perspektif yang digunakan cenderung menafikan variasi ruang dan perubahan *setting* waktu... Struktur patriarkhal... tidak hanya menyebabkan atau mendiktekan keabsahan nilai dan praktik sosial, tetapi juga meruakan virus yang menjangkiti ‘cara berfikir’ para peneliti yang menyebabkan gender dilihat sebagai sesuatu yang stagnan...”.

Akibatnya setiap wacana yang berkembang cenderung mereproduksi struktur timpang, yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, debat teoritik dan studi gender telah mengalami pergeseran. Perspektif terdahulu hanya terfokus pada perempuan dan feminitas, perspektif sekarang mengakui bahwa pemahaman gender secara lebih baik dapat dikembangkan dengan cara menyertakan dan/atau mempelajari laki-laki dan maskulinitas. Konstruksi gender dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat dimana mereka hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya masyarakat sebagai pedoman berperilaku berdasar nilai-nilai, norma dan tata aturan sebagai pengetahuan untuk bagaimana mereka mengembangkan relasi sosial budayanya (Haralambos et al. : 2000; Abdullah : 2001; Moore : 1988).

Peran gender diproduksi secara kultural daripada biologik, karena itu manusia mempelajari segala bentuk perilaku yang diharapkan berkaitan dengan peran gender, yaitu bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan, bagaimana menjadi suami dan istri di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Budaya memberikan pengaruh penting dalam kreasi dan/atau konstruksi tentang perilaku maskulin dan feminin. Namun, konstruksi tentang peran gender ini diproduksi dalam suatu tatanan (struktur) yang *bias* laki-laki. Struktur yang timpang (*bias*) ini

merupakan struktur yang hegemonik, sehingga menghasilkan suatu bentuk hubungan gender yang timpang dan relasi kekuasaan yang mengarah kepada *male-dominance*.

Kekuasaan (power) secara klasik didefinisikan oleh Weber sebagai “*the chance of a man or a number of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are participating in the action.*” Dengan perkataan lain, kekuasaan merupakan suatu bentuk penaklukan orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti kehendak kita. Perkembangan kajian tentang kekuasaan (power) dewasa ini telah mengalami pergeseran. Pertama, kajian klasik cenderung memandang kekuasaan dalam bentuk paksaan (force), sedang pendekatan baru tentang kekuasaan melihat dari sisi yang tidak melibatkan paksaan ataupun bujukan (persuading) dan/atau hegemonik (Gramsci, 1971). Kedua, pergeseran juga terjadi dari fokus, yang melihat kekuasaan hanya berpusat di tangan negara dan institusi resmi, ke fokus lain bahwa kekuasaan dapat ditemukan di semua bentuk hubungan sosial.

Studi Foucault tentang ‘kekuasaan/pengetahuan’ (power/knowledge) sangat relevan untuk menjelaskan relasi kekuasaan pada skala kecil (keluarga), sekalipun seluruh karyanya berkenaan dengan bagaimana Negara mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan kekuasaan terhadap rakyatnya. Foucault, kekuasaan erat berkaitan dengan pengetahuan : “*power/knowledge produce one another.*” Lebih jauh, Foucault (1991) mengatakan :  
...that power produces knowledge... that power and knowledge directly imply one another; that there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relation...

Perluasan kekuasaan suatu Negara dapat berarti perkembangan tipe-tipe pengetahuan baru yang memungkinkan Negara untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dan menggunakan lebih besar control terhadap rakyatnya. Caranya dapat dilakukan melalui wacana (discourses) : “*ways of talking about things, which have consequences for power.*” Kekuasaan tidak harus diterapkan dengan melibatkan paksaan, tetapi bekerja dalam suasana kebebasan, melalui proses mempengaruhi berdasar pengetahuan dengan membentuk wacana dan taktik yang digunakan untuk mengontrol kelompok-kelompok penduduk.

Penggolongan (classifying) dan monitoring orang dapat menghasilkan kemungkinan hubungan kekuasaan/pengetahuan yang terlokalisasi yang berlangsung pada tingkat individual. Wacana rumah tangga menghasilkan relasi kekuasaan yang berlangsung antara suami istri dan antara orang tua dan anak-anak. Namun kekuasaan, menurut Foucault, tidak dapat dimiliki, tetapi diterapkan, oleh individu. Kekuasaan hanya dapat diterapkan dengan cara meminta orang untuk melakukan sesuatu, ketika mereka mempunyai pilihan untuk tidak melakukan.

Kekuasaan muncul melalui perilaku ekonominya ketika manusia berhubungan secara timbale balik dengan lingkungan alam dan sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menggunakan berbagai strategi adaptasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya secara maksimal. Mereka bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi untuk memaksimalkan pendapatan dan status/kelas sosial. Gejala ekonomi dan kekuasaan tumbuh berkembang, karena ada system sosial yang mendukungnya. Itu sebabnya mereka melakukan satu atau lebih kegiatan ekonomi agar kekuasaan berdasar kelas sosial atas dapat tercapai. Pedoman perilaku ekonomi mereka berdasar latar belakang sosial budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki dalam iklim pasar yang kompetitif. Mereka mengambil keputusan dan menentukan pilihan rasional tentang berbagai strategi pemenuhan kebutuhan hidup berdasar ekonomi moral tertentu (Scott : 1981; Semedi : 2003; Putra : 2003).



## **BAB III**

### **MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1. Masalah :**

Bertolak dari kondisi pesisir serta keterbatasan partisipasi perempuan dalam sektor perekonomian, maka studi ini akan menjawab tentang : Bagaimanakah pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan untuk pengembangan manajemen komoditas yang berbasis potensi lokal?

#### **3.2. Tujuan Penelitian :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal seperti tertulis di bawah ini :

1. Mengidentifikasi perempuan yang melakukan usaha ekonomi produktif
2. Melakukan Identifikasi kemampuan perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif.
3. Mengidentifikasi potensi sumber daya non manusia sebagai sumber berkembangnya usaha ekonomi produktif

#### **3.3. Manfaat Penelitian :**

Manfaat penelitian ini meliputi dua jenis kemanfaatan, yaitu yang pertama adalah manfaat dari segi teoritis dan yang kedua adalah manfaat dari segi praktis. Manfaat dari segi teoritis berguna sebagai pengembangan pada bidang ilmiah, sementara itu manfaat dari segi praktis berorientasi pada pemberian masukan bagi para pengambil kebijakan di dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Kedua manfaat penelitian ini dapat disebutkan seperti di bawah ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah literatur dan bahan bacaan mengenai kajian pemberdayaan perempuan dalam usaha ekonomi produktif, di samping itu juga dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang telah ada terutama pada penelitian yang berbasis pada *gender mainstream*.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional agar dapat memposisikan diri sebagai pihak yang netral, sehingga pada akhirnya dapat memutuskan dengan lebih bersikap



arif dan bijaksana agar ketidakdilan yang terjadi dapat diminimalisir semaksimal mungkin dan peran perempuan dapat diupayakan untuk ditingkatkan.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Obyek Kajian dan Lokasi Penelitian**

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah individu, dan obyek penelitian yang dipilih adalah perempuan dan berdomisili di Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Lokasi penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini disinyalir terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai usaha ekonomi produktif akan tetapi belum banyak melibatkan perempuan dalam kegiatannya, sehingga cukup menarik untuk melihat mengembangkan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif. Dengan demikian hasil yang diperoleh nantinya dapat mendiskripsikan pemberdayaan perempuan dan realitas relasi jender yang semakin kompleks dan lebih dinamis.

#### **4.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang merupakan komunitas penduduk di Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang akan diambil adalah sebanyak 10 % dari total jumlah populasi yang memiliki kriteria seperti tersebut di atas. Adapun teknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive random sampling*.

#### **4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Data primer yakni : data dan informasi utama yang digali dalam penelitian dan diperoleh dari responden.
2. Data sekunder, yakni sesuai dengan sifatnya merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia.

Data primer diperoleh dengan cara melakukan :

- 1.1. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yakni membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan kepada responden.
- 1.2. Wawancara tidak berstruktur, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar informasi yang diperoleh lebih memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang hasil penelitian

yang dilakuka. Hal ini dilakukan pada beberapa responden terpilih, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai relasi jender yang terjadi di dalam keluarga mereka.

Sementara itu untuk data sekunder, dipergunakan teknik pengambilan data dokumentasi dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

#### **4.4. Teknik Analisa Data**

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk memproses data ini akan digunakan alat analisis statistik, karena salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan, mengolah, dan menganalisis data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan penggabungan dari analisis kuantitatif dan kualitatif, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya.

Analisa kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa persentase dan kecenderungan dari penelitian ini. Adapun untuk analisa kuantitatif dipergunakan analisis statistik deskriptif (univariat dan bivariat) yaitu :

1. Distribusi frekuensi yang dipergunakan sebagai dasar lebih lanjut.
2. Tabulasi silang (*cross tabulation*)

**Sedangkan analisa kualitatif dipergunakan untuk memberikan penjelasan dalam menafsirkan hasil angka-angka yang diperoleh dan mendeskripsikan temuan-temuan 'unik' dan spesifik yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan tidak dapat diberi konotasi angka.**

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Deskripsi Daerah Penelitian**

##### **5.1.1. Kondisi Geografis**

###### **a. Letak dan Luas Wilayah**

Desa Poncosari secara administratif memiliki luas 1.186,112 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 24 dusun dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Progo, Kabupaten Kulon Progo (Monografi Desa, 2010).

Seperti daerah pedesaan lainnya, Desa Poncosari juga merupakan desa agraris, sehingga penggunaan lahannya sebagian besar untuk pertanian. Berdasarkan data monografi desa luas lahan untuk pertanian adalah sebesar 61,99%/735,353 ha.

###### **b. Keadaan Iklim dan Topografi**

Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama minimal 30 tahun dan sifatnya tetap. Unsur iklim yang dibahas dalam penelitian ini *temperatur angin* dan *gelombang* serta *pasang surut air laut*. Salah satu faktor yang mempengaruhi temperatur di permukaan bumi adalah ketinggian tempat. Wilayah Desa Poncosari berbatasan langsung dengan laut yaitu Samudera Indonesia oleh sebab itu temperatur wilayahnya hampir sama dengan temperatur lautan (wawancara dengan Kabag Pemerintahan Desa Poncosari Sandi Wibowo, 5 Juli 2011).

Angin merupakan salah satu faktor penyebab gelombang. Frekuensi penangkapan ikan oleh nelayan poncosari sangat dipengaruhi oleh besarnya gelombang dan angin yang bertiup. Nelayan tidak akan melakukan aktifitasnya yang berupa penangkapan ikan apabila angin bertiup kencang dan terjadi gelombang besar, sehingga musim paceklik bagi nelayan Poncosari bersamaan dengan banyaknya gelombang besar dalam setiap bulannya. Musim paceklik bagi para nelayan adalah pada sekitar bulan Juni hingga September, bersamaan dengan bertiupnya angin dari tenggara yang sangat kencang sehingga menimbulkan terjadinya gelombang-gelombang besar. Angin dan gelombang besar juga sering terjadi pada akhir Desember hingga akhir Januari, yang dipengaruhi oleh angin Barat daya yang kencang dan menimbulkan gelombang yang besar pula (wawancara dengan Ali Sofyan Lurah Desa Poncosari, 6 Juli 2011).

Kecepatan angin pada bulan-bulan kering (April-Oktober) rata-rata sebesar 11,2 km/jam. Sedangkan kecepatan angin pada bulan-bulan basah atau musim penghujan (November-Maret) rata-rata sebesar 9,73 km/jam. Ini sesuai dengan penjelasan bahwa sekitar bulan Juni matahari berada dibelahan bumi utara (di atas Asia), sehingga udara diatas benua Asia bertekanan rendah (akibat pemuain udara). Akibatnya angin akan berhembus dari belahan bumi selatan yang bertekanan tinggi ke arah barat laut. Arus muson tenggara tersebut menimbulkan arus yang kuat di Samudera Hindia. Pada sekitar bulan Desember pada saat matahari berada dibelahan bumi selatan, pusat tekanan udara berkembang di atas benua Australia. Angin akan bertiup dari arah barat laut menuju tenggara, muson barat laut yang menimbulkan arus muson yang mengalir dari barat ke timur (Rahardjo, 1998).

Menurut pengamatan nelayan kondisi gelombang dan angin yang terdapat di sekitar Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru secara garis besar dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 5.1. berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Keadaan Gelombang dan Angin**

No.	Periode	Asal Angin	Sifat Gelombang
1.	Akhir Desember-Januari	Barat Daya	Besar
2.	Februari-Mei	Selatan	Kecil
3.	Juni-awal September	Tenggara	Besar
4.	Sept akhir-Pertengahan Okt	Utara	Kecil
5.	Akhir Okt-Des Pertengahan	Selatan	Kecil

**Sumber: Wawancara dengan Sumarman tahun 2011**

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa gelombang besar banyak terjadi pada akhir Desember sampai Januari dan Juni sampai awal September. Dengan mengetahui keadaan angin dilautan, gelombang yang terjadi dapat diukur. Jika angin dapat diramalkan maka gelombang yang akan terjadi dapat pula diramalkan. Tentu saja hal tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup dalam bidang Matematika, Fisika dan Komputer untuk memperoleh hasil peramalan yang baik. Akan tetapi berhubung nelayan di Desa Poncosari masih bersifat tradisional maka pengukuran gelombang hanya berdasarkan pada pengalaman pengamatan saja.

Pasang surut air laut juga mempengaruhi aktivitas melaut para nelayan tersebut. Namun bagi nelayan Desa Poncosari pasang surut air laut harian yang terjadi tidak berpengaruh terhadap aktifitas nelayan. Namun apa bila terjadi pasang tinggi yang biasanya disertai gelombang besar maka kegiatan penangkapan ikan menjadi terhenti. Pasang tinggi yang terjadi oleh masyarakat nelayan Poncosari dinamakan *lampor*. *Lampor* terjadi pada bulan purnama

dan biasanya berlangsung selama satu minggu (wawancara dengan Sumarman nelayan Pantai Kuwaru, 29 Juni 2011).

### **5.1.2. Keadaan Demografi**

#### **5.1.2.1. Penduduk**

Aspek Demografi merupakan suatu bagian yang penting untuk menganalisis aktifitas dan tingkat kemajuan penduduk suatu wilayah. Kondisi Demografi untuk masing-masing wilayah berbeda-beda, dengan demikian untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah perlu memasukkan faktor Demografi agar lebih mudah memahami kondisi suatu wilayah.

Keadaan penduduk Desa Poncosari mengalami perubahan dari tahun ketahun. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor politik dan ekonomi. Di samping kedua faktor tersebut faktor geografis juga mendukung penambahan penduduk.

Pertambahan penduduk di Desa Poncosari dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang tidak begitu pesat. Tetapi tidak jarang mereka mengorbankan lahan pertanian yang produktif untuk didirikan kawasan pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat pada jalur-jalur transportasi dan daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, jalur perekonomian dan jalan-jalan besar akan sangat cepat merubah areal persawahan menjadi menjadi pemukiman.

Berdasarkan monografi Desa Poncosari Jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2005 tercatat 13.272 jiwa yang terdiri dari 6.546 jiwa penduduk laki-laki dan 6.726 jiwa penduduk wanita. Jumlah penduduk di suatu daerah senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penduduk yang lahir, mati, datang dan pergi. Angka pertambahan penduduk adalah besarnya pertambahan penduduk suatu wilayah pertahun karena faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan penduduk yang terdapat di desa Poncosari dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut:

**Tabel 5.2.**  
**Perubahan Penduduk Desa Poncosari tahun 2000-2010**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2000	6.297	5.969	12.266
2.	2001	6.327	6.001	12.328
3.	2002	6.345	6.045	12.390

4.	2003	6.340	6.035	12.375
5.	2004	6.347	6.078	12.425
6.	2005	6.726	6.546	13.272
7.	2006	6.801	6.642	13.443
8.	2007	6.831	6.674	13.505
9.	2008	6.851	6.718	13.569
10.	2009	6.846	6.708	13.554
11.	2010	6.853	6.751	13.604

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010**

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap tahun desa Poncosari mengalami pertambahan penduduk yang tidak terlalu pesat, serta dapat dilihat pula bahwa pertambahan penduduk mencapai 1.338 jiwa dalam sepuluh tahun terakhir dilihat dari perkembangan penduduk dari tahun 2000-2010 tersebut.

Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai jumlah penduduk persatuan luas atau perbandingan antara jumlah penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut. Desa Poncosari mempunyai jumlah penduduk 13.604 jiwa dengan luas wilayah 1.186.1220 Ha Berarti dalam setiap km persegi ditempati sekitar 872 orang.

#### **5.1.2.2. Mata pencaharian.**

Meskipun Desa Poncosari merupakan desa agraris, mata pencaharian penduduk cukup bervariasi. variasi mata pencaharian penduduk Desa Poncosari dapat dilihat pada tabel 5.3.

**Tabel 5.3.**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Poncosari tahun 2001-2010**

No	Jenis Pekerjaan	2001	2003	2005	2007	2009	2010
1.	Karyawan						
	a. PNS	421	444	470	495	518	544
	b. ABRI	75	79	92	101	105	118
	c. Swasta	227	231	244	253	257	270
2.	Pedagang	2718	2723	2757	2777	2783	2817
3.	Tani	3835	3867	3875	3895	3927	3935
4.	Pertukangan	521	563	599	638	680	716
5.	Buruh Tani	2710	2723	2773	2804	2817	2842
6.	Pensiunan	240	236	243	244	240	247
7.	Nelayan	227	387	406	495	575	655
8.	Jasa	137	156	176	195	241	261
	<b>Jumlah</b>	<b>11.111</b>	<b>11.379</b>	<b>11.635</b>	<b>11.897</b>	<b>12.143</b>	<b>12.405</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Poncosari sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian lain yang juga banyak ditekuni oleh penduduk Desa Poncosari adalah sebagai pedagang. Dan untuk nelayan di Desa Poncosari pada tahun 2010 berjumlah 655 orang. Jika dilihat dari perkembangan dari tahun sebelumnya, mata pencaharian sebagai nelayan mengalami

peningkatan yang tidak terlalu banyak, hal tersebut disebabkan penduduk Desa Poncosari masih takut dengan keadaan gelombang laut yang besar, sehingga menyurutkan minat mereka dalam usaha pencarian ikan di laut. Hanya orang-orang yang mempunyai keberanian tinggi yang mampu mengalahkan rasa takut mereka dan berani terjun ke laut untuk mencari ikan. Begitu pula dengan perkembangan mata pencaharian yang lain seperti petani, pedagang dan sebagainya.

### **5.1.3. Kondisi Sosial Budaya**

#### **5.1.3.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu daerah di mana kemungkinan akan mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan aktifitas kehidupan dalam lingkungannya. Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diamati pada tabel 5.4 berikut.

**Tabel 5.4.**  
**Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan tingkat pendidikan th 2010**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Belum sekolah	1.136	8,35
2.	Tidak tamat SD	1.311	9,64
3.	Tamat SD	4.546	33,42
4.	Tamat SLTP	2.925	21,50
5.	Tamat SLTA	3.138	23,06
6.	Tamat PT/Akademi	548	4,03
	<b>Jumlah</b>	<b>13.604</b>	<b>100</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010**

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Poncosari yang memiliki jumlah terbesar adalah tamatan SD, yaitu sebesar 4546 orang. Tingkat pendidikan yang menduduki jumlah terendah yaitu tamatan perguruan tinggi atau akademi yaitu sejumlah 548 orang.

#### **5.1.3.2. Sarana dan Prasarana Desa**

Pembangunan sarana dan prasarana Desa Poncosari sangat membantu pembangunan daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah dibangunnya jalan-jalan beraspal pada tahun 1989 yang menghubungkan desa tersebut dengan daerah sekitarnya. Alat transportasi yang sudah memadai, karena jalan desa tersebut telah memiliki jalur bus yang menghubungkan terminal dengan Kota Yogyakarta dengan Terminal Pandansimo, sehingga Desa Poncosari banyak dilewati kendaraan umum dan bus pariwisata. Dalam masalah transportasi penduduk Desa Poncosari tidak mengalami kesulitan. Tersedianya sarana umum tersebut membuka kesempatan luas bagi warga desa untuk berinteraksi secara intensif dengan masyarakat kota



dan sekitarnya. Hal tersebut dapat terlihat dari gerak mobilitas penduduk yang pebergian ke Kota Yogyakarta dan sekitarnya karena di dorong oleh berbagai tujuan diantaranya untuk bekerja, sekolah, atau pun belanja.

Menurut Sandi Wibowo, selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Poncosari menerangkan bahwa penerangan di Desa Poncosari telah terpenuhi sejak adanya program Listrik Masuk Desa pada tahun 1989. Penerangan tersebut tidak hanya digunakan untuk penerangan rumah penduduk, namun juga digunakan sebagai penerangan jalan-jalan yang ada di desa tersebut. Hal itu mendorong penduduk Desa Poncosari untuk bisa beraktifitas sampai malam hari.

Selain listrik masuk desa, komunikasi di Desa Poncosari telah dipermudah dengan adanya alat komunikasi telepon yang juga telah masuk ke desa tersebut. Hal itu sangat membantu dan mempercepat penduduk desa dalam berhubungan dengan daerah lain.

Perubahan fisik lain yang ada di Desa Poncosari adalah semakin bertambahnya bangunan-bangunan yang telah ada dari bangunan semi permanen menjadi bangunan permanen. Hanya sebagian kecil dari rumah penduduk desa tersebut yang masih semi permanen. Bangunan permanen lainnya yaitu toko, losmen, restoran dan bangunan sekolah serta bangunan milik pemerintah.

Dilihat dari potensi wilayah maka Kabupaten Bantul mempunyai potensi wisata yang cukup besar yang meliputi wisata alam pantai, wisata pendidikan, taman hiburan, sentra industri kerajinan dan juga potensi perikanan yang besar. Dengan keanekaragaman potensi tersebut dan ditambah dengan pengelolaan secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian masyarakat, akan luas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik maka perikanan laut akan mendorong tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar pantai (wawancara dengan Ali Sofyan Lurah Desa Poncosari, 5 Juli 2011).

#### **5.1.3.3. Struktur Masyarakat.**

Masyarakat tradisional di pesisir pantai ini masih diikat oleh rasa kebersamaan, kegotongroyangan dan senasib sepenanggungan dalam ikatan suatu keluarga besar yang terdiri dari seluruh warga desa. Mereka menghadapi segala kesulitan hidupnya dalam satu kebersamaan yang saling membantu diantara sesama warga masyarakat. Mereka saling membantu dan bekerjasama dalam perbaikan jalan, upacara kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya.

Konsep struktur sosial masyarakat sering kali dipergunakan sebagai sinonim dari organisasi sosial dan terutama digunakan dalam analisa terhadap masalah kekerabatan, lembaga politik dan lembaga hukum dari masyarakat yang sederhana. Tetapi akan berlainan arti apabila penggunaannya dalam di dalam masyarakat diartikan seperti dalam teori struktur masyarakat bahwa struktur masyarakat sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial yang pokok tersebut mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial serta kekuasaan dan wewenang (Soekanto, 1983 : 113).

Kelompok-kelompok sosial yang dimaksud di sini adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka, saling tolong menolong, pengaruh mempengaruhi, nasib yang sama, kepentingan atau tujuan yang sama.

Dimasyarakat desa sendiri pada kenyataannya bukanlah masyarakat yang tersusun dari orang-orang yang serba sama tetapi masih membedakan anggota masyarakatnya menjadi berbagai lapangan sosial.

Dalam masyarakat nelayan yang ikut menentukan status sosial mereka dalam masyarakat adalah kepemilikan perahu dan peralatan tangkap ikan yang lain. Susunan masyarakat nelayan baik secara horizontal maupun vertikal sangat dipengaruhi oleh organisasi penangkapan ikan dan tingkat pendapatan yang mereka capai. Makin strategis posisinya dalam organisasi kerja nelayan dan makin besar pula pendapatan mereka, makin besar pula kemungkinan mereka menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Sebaliknya, makin kecil pendapatan mereka dan makin tidak strategis peran mereka dalam organisasi penangkapan ikan makin rendah pula posisi mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini juragan darat yang pemilik perahu dan alat menempati posisi lebih tinggi dari pada juragan laut atau pemimpin anak buah kapal. Sedangkan juragan laut lebih tinggi dibandingkan anak buah kapal yang terdiri dari satu atau dua orang.

Secara horizontal kelompok sosial kelompok sosial terkecil masyarakat nelayan adalah terwujud dalam bentuk kesatuan keluarga. Kelompok sosial terkecil ini didasari pada hubungan darah atau ikatan perkawinan. Pada tingkat yang lebih luas adalah kelompok-kelompok sosial yang masing-masing anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan kepemilikan atas sarana produksi. Hampir setiap nelayan tergabung dalam kelompok-kelompok sosial ekonomi seperti ini, yang hampir semuanya berpusat pada juragan. Hubungan yang terjadi diantara mereka bisa saja hubungan yang setara atau pun hubungan-hubungan yang terjadi sebagaimana hubungan antara patron dan klien (Mashuri, 1996 : 115).

Hubungan setara yang terjadi terutama pada nelayan-nelayan yang sama-sama mempunyai hak atas kepemilikan perahu. Mereka ini merupakan nelayan yang memiliki satu ikatan kerja, mendapatkan perahu dari juragan, mengoperasikan bersama-sama, membayar angsuran perahu bersama sehingga memiliki perahu itu bersama-sama setelah lunas. Pembagian pendapatan diantara mereka bervariasi, ada yang hasil dibagi sama besar, atau ada pula yang berdasarkan pada pertimbangan obyektif berdasarkan kemampuan mereka dalam usaha penangkapan ikan. Sementara hubungan patron klien terjadi diantara mereka jika hak kepemilikan perahu berada pada seorang juragan.

Masyarakat nelayan secara vertikal mempunyai bentuk susunan piramida, dengan puncaknya adalah para juragan dan familinya, kemudian lapisan berikutnya adalah kelompok pandega atau anak buah kapal beserta keluarganya, yang merupakan lapisan terbesar yang merupakan kelompok nelayan pada umumnya dan baru nelayan dorong (hasil wawancara dengan Tumijan di Pantai Kuwaru, 26 Juni 2011).

#### **5.1.3.4. Kehidupan Religius**

Penduduk desa pesisir Pantai Pandansimo dan Pantai Kuwaru sebagian besar beragama Islam. Meskipun para nelayan tersebut memeluk agama Islam, namun tampaknya mereka belum menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam secara baik dan benar. Seperti dalam hal sholat lima waktu, banyak dari para nelayan yang hanya mengerjakannya pada saat di rumah saja dan tidak mengerjakan sholat pada waktu mereka bekerja di laut (hasil wawancara dengan Sukanto seorang nelayan di Pantai Kuwaru, 26 Juni 2011).

Waktu penangkapan ikan nelayan Desa Poncosari pada umumnya adalah pagi hingga siang hari, yaitu pada pukul 05.30 WIB-11.30 WIB atau 6-7 jam di laut. Namun jika musim panen, bisa lebih lama lagi mereka berada di laut. Kalau ikan semakin banyak yang dapat ditangkap, biasanya selepas shalat luhur atau sekitar pukul 12.30 WIB mereka akan turun lagi mencari ikan sampai pukul 16.30 WIB.

Kehidupan beragama masyarakat pesisir yang saling hormat menghormati antara pemeluk agama nampak pada saat mereka bergotong royong dalam pendirian tempat ibadah dan sarana-sarana umum yang lain. Hal itu dapat dilihat saat pendirian masjid atau mushola disekitar pesisir atau pendirian kantor TPI dan kantor koperasi nelayan yang semua sarana tersebut dilakukan dengan bergotong-royong. Selain itu juga jika ada anggota nelayan mempunyai hajat seperti pesta pernikahan, khitanan, upacara kelahiran, kematian dan yang lainnya mereka akan saling membantu dan bekerja sama dengan suka rela (wawancara

dengan Ali Sofyan Lurah Desa Poncosari, 5 Juli 2011). Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan agama yang dianut dapat diamati pada tabel 5.5 berikut ini.

**Tabel 5.5.**  
**Jumlah penduduk Desa Poncosari berdasarkan agama yang dianut.**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	13.424
2.	Kristen	107
3.	Katholik	58
4.	Hindu	15
	<b>Jumlah</b>	<b>13.604</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010**

Dari tabel 5.5. tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Poncosari beragama Islam. Sedangkan yang mempunyai penganut kepercayaan terendah adalah agama Hindu. Untuk penganut agama Budha dan penganut kepercayaan lain tidak terdapat di Desa Poncosari.

**Tabel 5.6.**  
**Jumlah sarana peribadatan Desa Poncosari tahun 2010**

No	Sarana peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	26
2.	Mushola	12
3.	Gereja	2
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

**Sumber: Monografi Desa Poncosari tahun 2010**

Dari tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa masjid dan mushola menempati posisi tertinggi karena mayoritas penduduk Desa Poncosari beragama Islam. Untuk penganut agama Hindu, mereka beribadah dengan bergabung di desa tetangga, karena pengikutnya yang sangat sedikit.

Masyarakat pesisir Pantai Kuwaru dan Pandansimo setiap tahun melakukan upacara *sedekah laut* dengan mengambil waktu pada bulan Syawal minggu pertama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara besar-besaran dengan menghabiskan biaya lebih dari enam juta rupiah. Biaya tersebut didapat dari dana swadaya kelompok nelayan dan masyarakat sekitar pantai. Seperti pada kegiatan labuhan tahun 2010 lalu yang juga diadakan pada minggu pertama bulan Syawal yang berlangsung sangat meriah dan kegiatan tersebut rutin diadakan pada setiap tahunnya oleh Nelayan Kuwaru dan Pandansimo.

Dana swadaya kelompok nelayan ini didapat dari pengumpulan dana tiap nelayan yang dipungut saat rapat panitia labuhan yaitu satu bulan sebelum hari dilaksanakannya labuhan tersebut. Jika dana ini tidak mencukupi, pengurus nelayan akan mengajukan proposal kepada pemerintah setempat untuk meminta bantuan dana. Selain itu juga panitia akan meminta

sumbangan suka rela dari masyarakat sekitar pantai (wawancara dengan Adi Wardaya mantan kepala dusun Ngentak, 5 Juni 2011).

Adi Wardoyo yang merupakan ketua panitia sedekah laut atau *labuhan* tahun lalu ini berharap sedekah laut ini membawa berkah. Setidaknya di masa mendatang nelayan Pandansimo yang tergabung dalam wadah “Pandan Mino” bisa lebih banyak mendapatkan ikan. Selain itu sedekah laut juga mempunyai tujuan yaitu menghormati penguasa laut selatan Nyai Roro Kidul dengan maksud supaya penguasa Laut Selatan tersebut tidak meminta tumbal manusia, baik itu warga Desa Poncosari itu sendiri atau pun pengunjung pantai yang juga merupakan tempat wisata. Selain itu juga untuk menghormati arwah nenek moyang, juga sodaqoh. Upacara ini dipimpin oleh seorang pemuka agama atau kaum yang memimpin permohonan do’a agar diberi keselamatan, perlindungan dan ketentraman bagi semua warga masyarakat setempat khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Dalam upacara tersebut masyarakat bersama-sama membuat berbagai sesaji seperti nasi rasulan, ingkung ayam, pisang rojo, jajan pasar, golong, tumpeng, sego jowo, jenag-jenangan, buah-buahan, wangi-wangian, alat kecantikan dan lain sebagainya.

Untuk masyarakat pesisir Pantai Kuwaru tidak melakukan sedekah laut atau *labuhan*, namun mereka melaksanakan zikir pada setiap malam Selasa Kliwon bertempat di TPI Pantai Kuwaru dan diadakan rutin pada setiap bulannya. Mereka tidak mengadakan sedekah laut atau labuhan karena mereka menganggap sedekah laut atau labuhan adalah perbuatan sirik karena dilarang oleh agama. Mereka lebih suka melakukan zikir karena berharap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT (wawancara dengan Ponijo mantan ketua nelayan Pantai Kuwaru, 12 Mei 2011).

Ponijo selaku mantan ketua nelayan Pantai Kuwaru yang pertama menjelaskan bahwa kegiatan zikir tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama sejak berdirinya nelayan di Pantai Kuwaru. Ponijo juga mengatakan bahwa tujuan dari zikir ini adalah meminta perlindungan dari Allah SWT, meminta rezeki, keselamatan dan ketentraman baik itu selama melaut atau juga dalam kehidupan sehari-hari.

Kepercayaan lain yang timbul di masyarakat pesisir adalah adanya pantangan bagi mereka untuk memakai pakaian berwarna hijau tua. Mereka meyakini, bahwa warna tersebut merupakan warna kesukaan Nyai Roro Kidul sehingga memungkinkan orang yang memakai pakaian tersebut diambil sebagai tumbal. Kepercayaan warna hijau ini tidak hanya berlaku bagi warga nelayan saja, tetapi juga berlaku bagi pengunjung pantai. Pantangan yang lain adalah tidak diperkenankannya para nelayan mencari ikan di laut pada hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon (wawancara dengan Supardal seorang nelayan di Pantai Kuwaru, 13 Mei

2011). Mereka beranggapan bahwa hari Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon merupakan hari keramat dilihat dari perhitungan Jawa dan nenek moyang mereka. Jadi mereka akan berhenti melaut pada hari Kamis selepas Dzuhur dan berangkat melaut lagi pada hari Jumat selepas Dzuhur juga.

## **5.2. Profil Umum Dusun Kuwaru**

Dusun Kuwaru termasuk salah satu wilayah desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Prasarana jalan di Dusun Kuwaru ini memiliki jalan yang sempit yaitu sekitar 3-4 meter walaupun sudah diaspal hampir di seluruh pelosok desa. Sayangnya banyak juga jalan ber-aspal yang sudah mulai rusak. Sarana listrik sudah dapat dinikmati oleh semua warga dusun.

### **5.2.1. Kondisi Fisik Dusun Kuwaru**

Luas wilayah Dusun Kuwaru adalah  $\pm 240$  Ha



**Gambar 5.1. Peta Dusun Kuwaru**  
**Sumber : Observasi lapangan dan analisis peta**

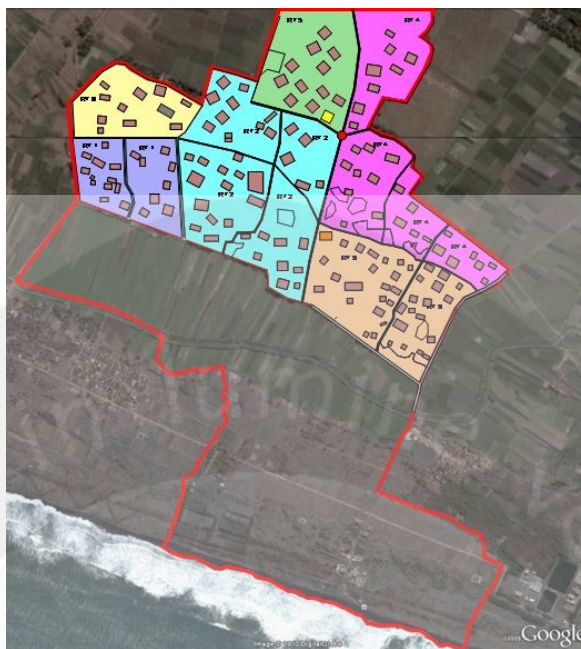
### **5.2.2. Letak wilayah Dusun Kuwaru**

Secara administratif wilayah Dusun Kuwaru berbatasan dengan wilayah:

- sebelah Barat : Dusun Ngentak,
- sebelah Utara : Dusun Karang,
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia,
- sebelah Timur : Dusun Cangkring.

### **5.2.3. Wilayah Administratif Dusun Kuwaru**

Secara administratif Dusun Kuwaru terdiri 6 wilayah Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 dan RT 6. Pemetaan secara geografis untuk keseluruhan Rukun Tetangga (RT) terletak disepanjang jalan utama yang sudah diaspal atau sudah menggunakan konblok.



**Gambar 5.2. Wilayah Administratif pembagian RT Dusun Kuwaru**  
**Sumber : Observasi Lapangan**

#### 5.2.4. Kependudukan

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) di Dusun Kuwaru sebanyak 160 KK, dengan jumlah warga sebanyak 592 orang, terdiri dari 291 laki-laki dan 301 perempuan dan tersebar dalam enam (6) Rukun Tetangga (RT) seperti tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 5.7. Jumlah dan Sebaran Penduduk Dusun Kuwaru per-wilayah RT**

No.	Wilayah	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Warga
1	RT 1	18	41	33	74
2	RT 2	20	39	35	74
3	RT 3	33	65	66	131
4	RT 4	30	60	70	130
5	RT 5	29	44	42	86
6	RT 6	29	42	54	96
TOTAL		160	291	301	592

**Sumber : Interview Dukuh dan Data Internal Dusun Kuwaru, 2011**

**Tabel 5.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	25	9	34
2	15-19	19	15	34

3	20-24	19	21	40
4	25-34	15	19	34
5	35-45	76	66	142
6	45-50	71	72	143
7	>50	76	89	165

**Sumber : Interview Dukuh dan Data Internal Dusun Kuwaru, 2011**

### 5.2.5. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Dusun Kuwaru secara umum dapat dibedakan dalam lima kategori yaitu Pertanian, Bangunan, Perdagangan, Jasa, dan Nelayan. Mata pencaharian terbesar adalah dari sektor Pertanian. Data mata pencaharian penduduk Dusun Kuwaru dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.9. Komposisi Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Mata Pencaharian	Prosentase		Jumlah
		L	P	
1.	Pertanian	150	157	307
2.	Bangunan	7	-	7
3.	Perdagangan	20	40	60
4.	Jasa	1	-	1
5.	Nelayan	75	104	207
6.	Lain-Lain	103		

**Sumber : Interview Dukuh dan Data Internal Dusun Kuwaru, 2011**

### 5.2.6. Fasilitas Pendidikan dan Ibadah

#### 5.2.6.1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Kuwaru adalah sebuah Taman Kanak-Kanak dan sebuah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Tabel 5.10. Tingkat Pendidikan Penduduk di Dusun Kuwaru**

No.	Pendidikan	Prosentase		Jumlah
		L	P	
1.	SD IT	40	45	85
2.	SD	85	67	142
3.	SLTP	40	33	73
4.	SLTA	62	40	102
5.	Akademik	5	5	10
6.	Perguruan Tinggi	7	6	13

**Sumber : Interview Dukuh dan Data Internal Dusun Kuwaru, 2011**



#### 5.2.6.2. Fasilitas Ibadah

**Tabel 5.11. Fasilitas Ibadah di Dusun Kuwaru**

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	3

*Sumber : Interview Dukuh dan Data Internal Dusun Kuwaru, 2011*

#### 5.2.7. Jaringan Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi

##### 5.2.7.1. Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih yang tersedia berasal dari air PAM. Namun peletakan sumber air PAM ini masih mengkhawatirkan karena daerah Selatan dekat dengan pembuangan.

##### 5.2.7.2. Jaringan Listrik

Jaringan listrik yang berada di Dusun Kuwaru lancar, karena didukung oleh kincir angin besar, satu(1) berada di Kuwaru dan 50 titik di Ngentak.

##### 5.2.7.3. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan Telekomunikasi yang ada di Dusun Kuwaru ini adalah HT (*Handy-Talky*) dan Handphone, sedangkan untuk telepon kabel belum ada.

#### 5.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 5.3.1. Potensi Wisata Pantai Kuwaru

Letak kawasan Pantai Kuwaru yang berada di wilayah geografis Kabupaten Bantul tidak bisa dilepaskan pula dari titik-titik obyek wisata lain yang berada berdekatan dengan kawasan Pantai Kuwaru. Seperti diketahui Kabupaten Bantul memiliki banyak obyek wisata yang menjadi andalan dalam mengelola potensi Bantul sebagai upaya pendapatan asli daerah. Keberadaan Kawasan Pantai Kuwaru yang berjarak 25 km dari Kota Bantul, sedangkan dari Yogyakarta berjarak 45 km membutuhkan banyak sarana pendukung guna memaksimalkan seluruh potensi dusun.

Upaya akses jalan menuju Pantai Kuwaru belum cukup memadai, mengingat jalan yang sudah diaspal mengalami banyak kerusakan sehingga mempersulit wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Kuwaru. Akses jalan yang belum memadai ini juga mempersulit

wisatawan datang ke objek-objek wisata sekitar sehingga tidak dapat saling mendukung terhadap keingintahuan dan kenyamanan wisatawan.

Melihat potensi wisata Kuwaru berada di tingkat Dusun, maka obyek wisata sekitar yang dipandang cukup relevan untuk dikaitkan adalah obyek wisata yang berada di wilayah tingkat Kelurahan Poncosari khususnya atau lebih luas di tingkat Kecamatan Srandakan, namun juga tidak terlepas dari obyek wisata Pantai Parangtritis dan Pantai Depok sebagai magnet utama wisata di Kabupaten Bantul.

Beberapa objek wisata yang dapat menjadi acuan dan pembanding dalam perkembangan potensi di Dusun Kuwaru dapat dilihat dari pemetaan wilayah dan letak obyek wisata tersebut.

### **5.3.2. Dusun Kuwaru dan Obyek Wisata di Sekitarnya**

#### **5.3.2.1. Dusun Kuwaru dan Potensinya**

Dusun Kuwaru bisa dikatakan merupakan nilai-nilai kekayaan daerah Kabupaten Bantul pada tingkat skala wilayah terkecil, karena di Dusun Kuwaru memiliki beberapa obyek wisata yang telah mampu diandalkan. Sedangkan pada tingkat wilayah lebih luas Dusun Kuwaru terkait pula dengan objek wisata yang berada di Kecamatan Srandakan. Sebagaimana diketahui beberapa obyek wisata di Kecamatan Srandakan diantaranya adalah Bendungan Bendo, Jembatan Srandakan, Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru, Agrowisata Lahan Pantai.

Namun demikian apabila dicermati potensi wisata di Pantai Kuwaru ini menunjukkan bahwa akses menuju lokasi obyek-obyek wisata belum terapresiasi dengan baik, khususnya dari papan penunjuk dan informasi peta. Bahkan tidak jarang wisatawan agak bingung untuk menuju lokasi obyek wisata yang dikunjungi.

#### **5.3.2.2. Dusun Kuwaru dan Pengembangan Sosial-Budaya**

##### **5.3.2.2.1. Partisipasi Masyarakat**

Keterpaduan pengembangan Dusun Kuwaru juga harus memuat pendekatan dari sosial-budaya. Dusun yang merupakan wilayah tempat tinggal kelompok masyarakat memiliki keterkaitan bahkan ketergantungan satu sama lain, sehingga masyarakat merupakan kelompok kecil yang memiliki kepentingan dan kekuasaan atas wilayah kecil mereka.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka model pengembangan Dusun Kuwaru ke arah Kawasan Pantai harus melibatkan partisipasi masyarakat sejelas mungkin. Beberapa kriteria pelibatan masyarakat meliputi :

**Tabel 5.12. Parameter Keterlibatan Masyarakat**

No.	Sifat Partisipasi	Parameter
-----	-------------------	-----------

1.	Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dilibatkan bekerja di dalam proyek pengembangan Dusun Kuwaru menjadi kawasan Kawasan Pantai untuk membangun sarana dan prasarana yang akan dilengkapi</li> <li>2. Masyarakat berperan sebagai pengusaha lokal atau pengelola di kawasan wisata setempat.</li> <li>3. Masyarakat memiliki peluang pendidikan dan pelatihan dari pengembangan produk dan kawasan wisata.</li> <li>4. Masyarakat menjadi pekerja-pekerja lokal di sektor pariwisata.</li> </ol>
2.	Tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menikmati efek positif pariwisata dari kawasan yang dibangun.</li> <li>2. Masyarakat menikmati rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>) dusun yang mereka tinggali.</li> </ol>

**Sumber: Data Primer diolah tahun 2011**

**Tabel 5.13. Daftar Fasilitas di Pantai Kuwaru**

No .	Fasilitas	Deskripsi	Jumlah/Kapasitas	Keterangan
1.	Kamar mandi / WC umum	Ada	4 buah	Terletak pada 1 titik saja
2.	Mushola	Ada	1 buah	Belum memenuhi syarat dan tidak terawat
3.	Warung / Rumah Makan	Ada	25 buah	Belum tertata dengan baik
4.	Jaringan Air Bersih	Ada		Belum menyeluruh, dan kondisi air masih keruh
5.	Jaringan Listrik	Ada		Belum menyeluruh
6.	Lahan Parkir	Ada	± 100 mobil, ± 1000 motor, dan ± 10 bus	Tersebar dalam 5 titik

7.	SAR	Ada	5 orang	-
8.	Keamanan Lingkungan	Ada	± 10 orang	Swadaya penduduk Dusun Kuwaru
9.	Juru Kunci	Ada	1 orang	Ada pemakaman umum
10.	Kios Souvenir dan Oleh-oleh	Belum ada	-	-
11.	Sarana Kesehatan	Belum ada	-	-
12.	Jaringan Air Kotor	Belum ada	-	-
13.	<i>Tour Guide</i>	Belum ada	-	-
14.	Penginapan ( <i>Homestay</i> )	Belum ada	-	-
15.	Tenaga Kebersihan	Belum ada	-	-
16.	Tempat Pembuangan Sampah	Belum ada	-	Hanya berupa tempat sampah yang tersebar di banyak titik

**Sumber: Data Primer diolah tahun 2011**

#### **5.3.2.2.2. Inkulturasi Budaya**

Hubungan pengembangan Dusun Kuwaru dengan partisipasi masyarakat diharapkan akan semakin memperkembangkan kekayaan budaya lokal. Bertemu dengan wisatawan yang datang dari berbagai daerah dan negara dengan latar belakang budaya berbeda bisa memberi warna pada budaya lokal. Proses ini dikenal dengan inkulturasi, yaitu perpaduan budaya yang memperkaya dan bukannya merusak budaya lokal, sehingga pendekatan pengembangan dan pembangunan sarana di Pantai Kuwaru menggunakan konsep bangunan tradisional yang telah ada, yaitu perpaduan arsitektur jawa. Ciri ini penting untuk memberi ciri khas Pantai Kuwaru.

#### **5.3.2.3. Pengembangan Ekonomi Dusun Kuwaru**

Konsep pengembangan dusun menjadi Kawasan Pantai bisa terukur dengan pasti dari nilai ekonomis yang dihasilkan dari kawasan wisata tersebut, dan dari nilai ekonomis itulah diharapkan mampu memberi kesejahteraan masyarakat setempat serta mengurangi angka kemiskinan, sehingga hakekat fungsi pariwisata sesungguhnya bisa tercapai, yakni “Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata”.

Esensi dasar ini mengandung konsekuensi untuk memberi nilai jual pada *item-item* produk wisata sebagai komoditas wisata, namun tanpa harus mengeksplorasi secara berlebihan guna mendapatkan keuntungan ekonomis tersebut. Hal utama yang harus dijaga adalah perlindungan kawasan (konservasi) dan habitat yang ada (ekologi). Oleh karena itu segala bentuk pengembangan dan kerjasama dengan pihak swasta harus memberi kontribusi yang saling menguntungkan.

### **5.3.3. Pengembangan Pariwisata Pantai Kuwaru**

#### **5.3.3.1. Sistem Pemasaran Produk Kuliner Kawasan Pantai Kuwaru**

Di Kawasan Pantai Kuwaru ini tersedia banyak pilihan aneka kuliner, terutama *seafood* banyak dijumpai. Menurut para pedagang yang berada di sekitar pantai, jumlah pengunjung yang datang tetap lumayan meskipun saat itu bukan musim liburan atau hari minggu sehingga mereka tidak khawatir akan merugi. Selain itu, di sekitar pantai terdapat beberapa warung makan yang siap mengolah aneka hasil laut. Ikan segar hasil tangkapan para nelayan ini bisa anda nikmati dalam aneka masakan. Soal harga tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan restoran *seafood* di kota. Melihat potensi hasil laut yang besar, tak heran jika ke depannya Pantai Kuwaru akan dikembangkan menjadi dermaga pelabuhan ikan yang terintegrasi. Penduduk sekitar biasanya mendatangkan ikan dari berbagai daerah.

#### **5.3.3.2. Produk Pariwisata Pantai Kuwaru**

Kuwaru merupakan Kawasan Pantai. Oleh karena itu, sebagian masyarakat di Kawasan Pantai ini bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga banyak hasil laut yang dijadikan komoditi utama di pantai Kuwaru. Wisatawan dapat membeli hasil laut untuk dibawa pulang atau dapat langsung dinikmati di tempat karena terdapat banyak warung untuk mengolah hasil laut tersebut. Namun terkadang nelayan tidak bisa melaut akibat air laut pasang, sehingga penduduk sekitar sering mendatangkan ikan dari daerah lain untuk memenuhi permintaan wisatawan.

Dari pemetaan dan identifikasi potensi-potensi di Kawasan Pantai Kuwaru perlu ditambahkan pengembangan produk-produk wisata yang berfungsi mendukung *ikon* utama Kawasan Pantai Kuwaru sebagai penghasil produk hasil laut selain juga mengembangkan Kawasan Pantai Kuwaru secara umum.

Beberapa pengembangan produk yang diusulkan di Dusun Kuwaru adalah:



**Tabel 5.14. Pengembangan Produk Wisata Dusun Kuwaru**





No.	Produk Wisata	Deskripsi	Prospek Produk	Keterangan

1	Kawasan Budaya Cemara Laut	Cemara Laut yang hanya ada di Pantai Kuwaru dapat menjadi faktor utama ketertarikan wisatawan, selain itu pohon cemara laut ini juga berfungsi sebagai penahan abrasi	Untuk menghidupkan kawasan pantai dan juga untuk pelestarian lingkungan	Belum dikelola
2	Kawasan Pantai	Kelengkapan sarana dan prasarana di tingkat dusun dan rumah penduduk untuk memfungsikan dusun sebagai kawasan Kawasan Pantai	Untuk menghidupkan kawasan pantai	Belum dikelola
3	Kawasan Rekreasi Keluarga	Keragaman wisata untuk mendukung kegiatan Kawasan Pantai, seperti : <i>Outbond, Homestay, Agrowisata</i>	Perkembangan tren wisata alam dgn pilihan aktivitas yg banyak	Belum dikelola
4	Wisata Kuliner	Mengangkat menu khas pantai seperti aneka macam olahan <i>seafood</i>	Perkembangan tren wisata unik dan khas	Belum dikelola (Pembuatan menu hanya berdasar pesanan)



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

**Tabel 5.15. Potensi Wisata di Dusun Kuwaru**

No	Potensi	Kategori Wisata	Deskripsi	Keterangan
1	<b>Kawasan Pantai (Pemandangan Alam)</b>	Wisata Alam	Pantai Kuwaru merupakan salah satu pantai yang terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta, tepatnya berada di kelurahan Poncosari, kecamatan Srandakan Bantul Yogyakarta. Pantai Kuwaru menawarkan keindahan alam yang masih asli, jajaran pohon cemara yang masih rindang membuat pantai kuwaru terasa begitu asri	Belum dikelola
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <p><b>Gambar 5.3. Area pohon cemara pantai</b></p> <p><b>Gambar 5.4. Jalan masuk area pantai</b></p> </div>				

2	<b>Wisata Kuliner</b>	Wisata Minat khusus	<b>Wisata</b> kuliner <i>seafood</i> di Pantai Kuwaru, yang terletak di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tidaklah setenar Pantai Depok, Parangtritis. Meski belum terkenal sebagai pantai yang menyediakan olahan makanan segar dari hasil tangkapan di laut, namun belakangan ini, menjadi salah satu alternatif wisata kuliner keluarga	Dikelola
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>Gambar 5.3. Pondok-pondok warung makan di Pantai Kuwaru</b></p>				
3	<b>Kolam Renang Air Tawar</b>	Wisata Minat khusus	Kolam renang milik perorangan yang disewakan untuk hiburan umum. Keberadaan kolam renang ini akan mendukung perencanaan area hiburan di seputaran pantai.	Dikelola
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;"><b>Gambar 5.4. Kolam renang air tawar di Pantai Kuwaru</b></p>				
4	<b>Motor ATV</b>	Wisata Minat khusus	Motor roda 4 yang disewakan khusus untuk pengunjung dengan tarif Rp 25.000,00 tiap 15 menit	Dikelola



				
5	<b>Outbond</b>	Wisata Minat khusus	Suatu kegiatan bersama di alam di mana para pelaku diuji kemampuan kerja berkelompoknya melalui permainan-permainan sembari menikmati suasana alam	Belum dikelola
	 <p><b>Gambar 5.6. Kawasan pedesaan yang masih alami dapat dijadikan jalur kegiatan rekreasi outbond</b></p>			
6	<b>Jelajah Desa dengan Sepeda</b>	Wisata Minat khusus	Kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan dengan media transportasi sepeda yang disewakan oleh penduduk sembari mengenali kehidupan pedesaan	Belum dikelola





Gambar 5.7. Aktivitas jelajah desa dengan media transportasi sepeda

7	<b>Kereta Kelinci</b>	Wisata Minat khusus	Berwisata ke pantai Kuwaru dengan menggunakan kereta kelinci dari wilayah lain	Dikelola
<div data-bbox="345 1073 820 1457" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="862 1077 1318 1457" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="518 1522 1174 1587" data-label="Caption"> <p>Gambar 5.8. Kereta kelinci sebagai media transportasi massal untuk membawa wisatawan</p> </div>				
8	<b>Menginap di Homestay</b>	Wisata Minat khusus	Kegiatan yang dilakukan untuk menikmati nuansa kehidupan pedesaan seperti : hidangan tradisional, aktifitas kehidupan setempat, hingga sajian budaya tradisional	Belum dikelola



Gambar 5.9. Rumah-rumah penduduk yang dapat difungsikan sebagai *homestay* bagi para wisatawan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2010

#### 5.3.4. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Komoditas Perekonomian Lokal

##### 5.3.4.1. Kondisi Status Sosial Ekonomi Responden Dan Keluarga

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran produktif perempuan yang terkait dengan kegiatan masyarakat di sekitar pesisir. Oleh karena itu responden penelitian yang ini adalah para perempuan yang melakukan aktivitas pendacraian nafkah di sekitar pesisir yakni tepatnya di sekitar Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa umur rata-rata responden berkisar antara 35-44 tahun, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase yang terbesar (52,00 %) dari distribusi umur responden yang terletak pada interval umur tersebut. Di samping itu umur responden antara 25-34 tahun menempati urutan kedua dalam penyebaran umur responden yakni sebesar 26,00 % dari total jumlah responden. Sementara umur responden lebih dari 54 tahun adalah yang paling sedikit yakni hanya 04,00 % saja dari total jumlah responden, lalu umur responden antara 45-54 tahun dalam penelitian ini diketahui sebanyak 5 orang (10,00 %), dan ada sebanyak 4 orang (08,00 %) adalah responden dengan umur kurang dari 25 tahun. Melihat distribusi umur responden yang demikian maka berdasarkan komposisi umur responden dapat digolongkan dalam struktur umur produktif karena masih berkisar antara 25 hingga 54 tahun. Dengan demikian dari distribusi umur responden yang diperoleh maka dapat

dikatakan bahwa di sekitar Pantai Kuwaru ini ada potensi sumber daya manusia yang produktif yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk pengembangan perekonomian masyarakat sekitar dan tentunya juga dapat dijadikan sebagai sumber potensi untuk menciptakan kesejahteraan keluarga.

**Tabel 5.16.**  
**Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	%
1.	< 25 tahun	4	08,00
2.	25 – 34 tahun	13	26,00
3.	35 – 44 tahun	26	52,00
4.	45 – 54 tahun	5	10,00
5.	> 54 tahun	2	04,00
<b>Total</b>		50	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Tingkat pendidikan (formal) merupakan salah satu perubah yang menentukan jenis pekerjaan serta tingkat upah atau gaji bagi tenaga kerja, namun selain faktor tersebut gaji atau pendapatan seseorang bisa ditentukan dari pengalaman kerja serta ketrampilan yang dimiliki masing-masing individu. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rata-rata responden memiliki tingkat pendidikan SMP yakni sebanyak 22 orang (44,00 %) sementara itu jumlah responden yang berpendidikan SMA ada sebanyak 13 orang (26,00 %), lalu yang memiliki pendidikan SD ada sebanyak 10 orang (20,00 %), sedangkan tingkat pendidikan responden yang bisa mencapai jenjang diploma ada sebanyak 2 orang (04,00 %) dan yang memiliki tingkat pendidikan sarjana ada 1 orang (02,00 %). Melihat distribusi tingkat pendidikan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden relatif masih tergolong rendah, meskipun ada beberapa responden yang telah mencapai tingkat pendidikan diploma bahkan sarja. Dengan demikian Nampak bahwa partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan masih relatif rendah bila dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Hal ini disebabkan budaya patriarki yang masih memperoleh prioritas pendidikan kepada laki-laki daripada perempuan, di samping itu juga keluarga seringkali mengalokasikan sumber daya mereka yang berupa waktu dan uang diantara anggota-anggota keluarganya dalam cara yang rasional. Oleh karenanya orang tuapun akan memberi porsi yang berbeda antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan, dan mereka lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki daripada perempuan karena laki-laki akan menjadi tulang punggung keluarga yang akan dibentuknya sementara anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya jika mereka telah berumah tangga kelak.

Data selengkapnya mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.17.**

**Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	10	20,00
2.	SMP	22	44,00
3.	SMA	13	26,00
4.	Diploma	2	04,00
5.	Sarjana	1	02,00
6.	Lainnya	2	04,00
Total		50	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Pendidikan berpengaruh kuat terhadap perilaku ekonomi perempuan pada umumnya, bahkan perempuan yang berpendidikan rendah kurang bisa berkompetisi pada bidang pekerjaan, belum cukup mampu untuk bersaing di pasar kerja. Bagi perempuan di pedesaan rendahnya pendidikan telah menyebabkan peluang berpartisipasi ekonomi menjadi semakin kecil, bagi perempuan di perkotaan yang berpendidikan menengah ke atas lebih berpeluang berpartisipasi secara ekonomi di sektor jasa daripada sektor perdagangan dan industri. Sementara perempuan di pedesaan sampai saat ini masih sulit untuk berpartisipasi ekonomi dikarenakan faktor rendahnya pendidikan. Kalaupun mereka berpartisipasi ekonomi lebih terdorong dari kemiskinan yang dialaminya. Selain itu, perempuan pedesaan cenderung bersikap negatif terhadap kegiatan ekonomi dikarenakan nilai-nilai personal yang lebih kuat untuk mendorong perempuan untuk tidak berpartisipasi ekonomi (faktor nilai domestik). Namun demikian dengan berkembangnya Pantai Kuwaru sebagai tempat wisata kuliner, maka banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan wisata tersebut.

Kajian tentang partisipasi perempuan di pedesaan secara umum dapat dikelompokkan dalam dua peran besar. Dua peran tersebut adalah : peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi atau peran domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengatur (pengelola) rumah tangga. Sementara itu peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan.

Perempuan dalam menjalankan peran tradisi, mereka berperan dalam mendampingi, melayani dan bahkan mengabdikan kepada suami; mengatur, menyiapkan, dan menyajikan kebutuhan pangan dan gizi serta kesehatan seluruh anggota rumah tangga, mendidik anak serta mengelola kebersihan dan kenyamanan rumah tinggal. Peran tradisi perempuan tersebut muncul sebagai produksi sosial masyarakat, artinya seberapa besar seorang perempuan

menjalankan peran tradisi tersebut (relatif dibandingkan dengan laki-laki) dalam suatu rumah tangga bervariasi menurut tempat, waktu, budaya dan adat di mana masyarakat itu berada.

**Sementara itu pada peran transisi, perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomi (mencari nafkah) di berbagai jenis kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia baginya.**

Perempuan desa terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin, merupakan “tenaga kerja cadangan” dari keluarga yang memiliki potensi untuk menaikkan kesejahteraan keluarga. Masalah yang dihadapi tenaga kerja perempuan di perdesaan adalah merupakan masalah yang kompleks. Hal ini disebabkan karena mengandung banyak muatan kultural, serta menyangkut masalah dasar yakni harkat dari perempuan itu sendiri dan bukan hanya sekedar memberi kesempatan bekerja bagi perempuan. Berbeda dengan seorang laki-laki yang mencari pekerjaan yang dapat mencari dan mengambil pekerjaan secara bebas maka tidak demikian halnya bagi perempuan perdesaan pada umumnya. Mereka dalam mencari dan menemukan pekerjaan tidak sebebas seperti halnya dengan kaum laki-laki, ada pembatas kultural yang membatasi kaum perempuan perdesaan. Keadaan ini menjadi bertambah kompleks tatkala ada hambatan lain yang terdapat dalam diri perempuan yakni berupa rendahnya ketrampilan mereka yang pada hakikatnya merupakan akibat dari persepsi kultural masyarakat terhadap perempuan.

Adapun batasan-batasan kebudayaan yang menyebabkan perempuan tidak sebebas laki-laki dalam memilih lapangan pekerjaan adalah adanya pembatasan kebudayaan yang menekankan agar perempuan dalam mencari dan memilih pekerjaan tidak melanggar kodrat mereka sebagai perempuan. Pembatasan kebudayaan lain adalah persepsi bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kemampuan yang berbeda, perempuan masih dianggap mempunyai kemampuan fisik maupun intelektual yang lebih rendah daripada laki-laki.

**Tabel 5.18.**

### **Tingkat Pendidikan Pasangan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	4	08,00
2.	SMP	10	20,00
3.	SMA	16	32,00
4.	Diploma	11	22,00
5.	Sarjana	8	16,00
6.	Lainnya	1	02,00
<b>Total</b>		50	100,00

### Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011

Hasil di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasangan responden (suami) adalah cenderung berpendidikan menengah bahkan tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil yang diperoleh bahwa pendidikan pasangan responden setingkat SMA ada sebanyak 16 orang (32,00 %), kemudian yang menyatakan pendidikan pasangannya adalah Diploma ada sebanyak 11 orang (22,00 %), lalu yang menyatakan pendidikan pasangannya Sarjana ada sebanyak 8 orang (16,00 %). Sedangkan responden yang menyatakan pendidikan pasangannya adalah SD hanya ada sebanyak 4 orang (08,00 %) dan ada sebanyak 10 orang (20,00 %) yang menyatakan pendidikan pasangannya adalah SMP.

Berdasarkan komposisi pendidikan pasangan responden, nampak bahwa rata-rata pendidikan pasangan responden (laki-laki) terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan responden (perempuan). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan perempuan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka untuk memberdayakan mereka dalam memasuki dunia kerja (sektor ekonomi).

Responden sebagian besar (60,00 %) berprofesi sebagai pedagang kuliner di warung sekitar Pantai Kuwaru adalah sebagai mata pencaharian pokoknya, dan sisa lainnya yakni 40,00 % menyatakan sebagai mata pencaharian sampingannya. Pilihan pekerjaan sampingan responden sebagai pedagang kuliner di warung sekitar Pantai Kuwaru dilakukan dengan pertimbangan untuk membantu kerja suami yang berprofesi sebagai nelayan, melakukan diversifikasi usaha selain di sektor pertanian, dan juga menambah pendapatan keluarga. Sementara pedagang kuliner warung di sekitar Pantai Kuwaru yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan pokok sebagian besar menyatakan bahwa bekerja sebagai pedagang warung di sekitar Pantai Kuwaru adalah untuk menangkap peluang pasar karena wisata di Pantai Kuwaru saat ini sedang berkembang dan banyak pengunjungnya, menyalurkan bakat memasak yang dimiliki, menyalurkan bakat berdagang, membantu mencari nafkah suami. Secara keseluruhan mengenai alasan yang diberikan responden terkait dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.19.

### Alasan Responden Atas Pilihan Pekerjaan

No	Alasan Responden	Jumlah	%
1.	Pekerjaan Pokok	30	60,00
	a. menangkap peluang pasar	12	40,00
	b. menyalurkan bakat memasak	6	20,00
	c. menyalurkan bakat berdagang	4	13,33
	d. membantu mencari nafkah suami	8	26,67
2.	Pekerjaan Sampingan	20	40,00

a. membantu kerja suami sebagai nelayan	8	40,00
b. menambah pendapatan dari sektor pertanian	5	25,00
c. menambah pendapatan keluarga	7	35,00
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai pedagang di sekitar Pantai Kuwaru dilakukan sebagai mata pencaharian pokoknya, dari sebanyak 30 orang yang menyatakan berjualan di sekitar Pantai Kuwaru sebagai mata pencaharian pokoknya, 40 % menyatakan bahwa mereka berjualan karena menangkap peluang pasar dan paling sedikit 13,33 % menyatakan mereka berjualan karena menyalurkan bakat berdagangnya. Sisa lainnya yakni sebesar 20 % menyatakan mereka berdagang di sekitar Pantai Kuwaru karena ingin menyalurkan bakat memasaknya dan 26,67 % menyatakan bahwa mereka membantu mencari nafkah suami mereka.

Sementara itu dari sebanyak 20 orang yang menyatakan bahwa responden bekerja sebagai pedagang kuliner warung di sekitar Pantai Kuwaru sebagai pekerjaan sampingan, ada sebesar 40 % yang menyatakan bahwa mereka bekerja karena membantu kerja suami sebagai nelayan, kemudian ada sebesar 25% menambah pendapatan dari sektor pertanian, dan ada sebesar 35 % menyatakan menambah pendapatan keluarga

**Tabel 5.20.**  
**Jenis Pekerjaan Responden dan Rata-rata Pendapatan Responden**  
**(Dalam Sebulan)**

Jenis Pekerjaan Responden		Rata-rata Pendapatan Responden											
		< Rp. 500.000,-		Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-		Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-		> Rp. 2.000.000,-		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Petani Pemilik		0	00,00 00,00	2	50,00 18,19	2	50,00 10,53	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	4	100,00 08,00
Petani Penggarap		1	14,29 20,00	4	57,14 36,36	2	28,57 10,53	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	7	100,00 14,00
Buruh Tani		4	44,44 80,00	4	44,44 36,36	1	11,12 05,26	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	9	100,00 18,00
Pedagang Warung Kuliner		0	00,00 00,00	1	03,33 09,09	14	46,67 73,68	10	33,33 100,00	5	16,67 100,00	30	100,00 60,00
Jumlah		5	10,00 100,00	11	22,00 100,00	19	38,00 100,00	10	20,00 100,00	5	10,00 100,00	50	100,00 100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Pekerjaan berperan dalam pencapaian status sosial ekonomi keluarga, terutama jika dikaitkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Hal ini disebabkan dengan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh masing-masing anggota rumah tangga akan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan yang diperoleh dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini nampak bahwa seluruh responden (100 %) bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga mereka. Responden yang memilih pekerjaan berdagang di sekitar Pantai Kuwaru sebagai mata pencaharian pokok memiliki rata-rata pendapatan per bulan sangat bervariasi, dari sebanyak 30 orang yang menyatakan pendapatan mereka per bulan antara Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.500.000,- ada sebanyak 14 orang (46,67 %), kemudian yang menyatakan antara Rp. 1.500.001,- s/d Rp. 2.000.000,- ada sebanyak 10 orang (33,33 %), jumlah responden yang menyatakan berpenghasilan di atas Rp. 2.000.000,- ada sebanyak 5 orang (16,67 %), dan sebanyak 1 orang (03,33 %) yang menyatakan jumlah penghasilan per bulan mereka antara Rp 500.001 s/d Rp. 1.000.000,-.

Sementara itu responden yang menyatakan pekerjaan berdagang di sekitar Pantai Kuwaru sebagai mata pencaharian sampingan ada sebanyak 20 orang. Dari 20 orang tersebut sebanyak 4 orang memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani pemilik, kemudian ada sebanyak 7 orang memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani penggarap dan ada sebanyak 9 orang memiliki mata pencaharian pokok sebagai buruh tani. Jumlah pendapatan responden dari mata pencaharian sebagai petani pemilik menunjukkan ada sebanyak 2 orang yang menyatakan pendapatan mereka antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-, dan sebanyak 2 orang yang menyatakan pendapatan mereka antara Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.500.000,-. Responden yang memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani penggarap menyatakan pendapatan mereka dari pekerjaan pokoknya kurang dari Rp. 500.000,- ada sebanyak 1 orang, kemudian ada sebanyak 4 orang yang menyatakan penghasilan mereka dari pekerjaan pokoknya sebesar Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,- dan ada sebanyak 2 orang yang menyatakan penghasilan mereka antara Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 1.500.000,-. Sedangkan yang memiliki mata pencaharian pokok sebagai buruh tani, menyatakan penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan pokok mereka kurang dari Rp. 500.000,- ada sebanyak 4 orang, kemudian ada sebanyak 4 orang pula yang menyatakan dari penghasilan pokok mereka antara Rp. 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,- dan ada sebanyak 1 orang yang menyatakan besarnya penghasilan dari mata pencaharian pokoknya antara Rp. 1.000.001 s/d Rp. 1.500.000,-.

Berdasarkan pendapatan yang diterima oleh responden di atas, nampaknya bekerja sebagai pedagang kuliner di sekitar Pantai Kuwaru menjanjikan penghasilan bagi masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu rumah tangganya. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa responden yang memiliki pekerjaan pokok sebagai petani pemilik, petani penggarap dan buruh tanipun juga terlibat dalam pekerjaan sebagai pedagang di sekitar Pantai Kuwaru. Jumlah pendapatan pedagang kuliner di sekitar Pantai Kuwaru lebih banyak lagi saat-saat liburan tiba, karena tempat ini akan dipadati banyak pengunjung yang akan berwisata sambil menikmati kuliner di



sekitar pantai. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang responden bernama Bu Tini (nama samaran) yang berjualan di sekitar Pantai Kuwaru.

“..... saya sudah tiga tahun berdagang di sekitar Pantai Kuwaru, yaitu sejak Pantai Kuwaru dibuka sebagai tempat wisata, menurut saya berjualan di sekitar pantai ini sungguh sangat menyenangkan dan menjanjikan jika dibandingkan hanya mengandalkan hasil kerja jadi petani, soalnya kalau di sektor pertanian hasil baru bisa dirasakan kalau kita sudah memanen hasil pertanian yang kita garap, itu saja kalau berhasil karena kadang-kadang hasil panen tidak dapat dinikmati sama sekali, terutama kalau hujan atau kemarau terlalu panjang. Bisa dilihat sendiri kalau sekarang musimnya tidak tentu, lha kalau sudah begitu maka hasil tani tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu daripada tidak dapat uang dan kebutuhan rumah tidak mencukupi maka saya selain hidup dari hasil pertanian terus terang saya juga bekerja jadi pedagang warungan di sekitar Pantai Kuwaru ini. Dari pendapatan yang diperoleh cukup lumayan hasilnya, karena dari hasil dagang di warung saya bisa dapat penghasilan kurang lebih satu hingga dua jutaan setiap bulannya, sedang hasil seperti itu sulit jika saya mengharapkan dari pertanian. Hasil yang saya peroleh dari tani kalau dirata-rata sebulan, ya tentu kurang dari lima ratus ribu, belum lagi pupuk dan ongkos mengolah bidang pertanian cukup mahal kalau sekarang ini, belum lagi kebutuhan rumah sekarang juga makin lama makin tambah banyak. Jadi ya bisa dimengerti kalau penduduk sekitar sini, terutama ibu-ibunya yang banyak kerja untuk dagang di sekitar Pantai Kuwaru ini.....”

Hasil wawancara dengan salah seorang responden tersebut, membuktikan bahwa berdagang warung di sekitar Pantai Kuwaru bagi para perempuan sekitar merupakan tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan banyak membantu dalam mengatasi kekurangan keuangan yang dialami oleh keluarga yang bersangkutan.

Tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan bagi para perempuan saja pekerjaan di sekitar Pantai Kuwaru ini dapat menjadikan tumpuan hidup keluarga. Namun juga para suami mereka juga dapat memperoleh penghasilan dari wisata pantai di sekitar Dusun Kuwaru ini. Hal ini terlihat dari banyaknya suami responden yang juga terlibat untuk bekerja di sekitar Pantai Kuwaru, entah itu sebagai nelayan, tukang parkir, bekerja di tempat pelelangan ikan, menyewakan tikar, dan juga sebagai pedagang di sekitar pantai. Pekerjaan yang dilakukan suami di sekitar Pantai Kuwaru, sebagian besar adalah merupakan pekerjaan sampingan, karena pekerjaan pokok suami sebagian besar adalah sebagai petani, yakni dari sebanyak 50 orang pasangan responden, yang menyatakan memiliki pekerjaan pokok sebagai petani ada sebanyak 32 orang (64 %), sisa lainnya adalah bekerja sebagai buruh bangunan 8 orang (16 %), kemudian sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya adalah sebagai perangkat desa atau dusun ada sebanyak 6 orang (12 %), dan sebagai pegawai swasta ada sebanyak 1 (2 %), dan sebagai wiraswasta ada sebanyak 3 orang (6 %). Jumlah suami responden yang

menekuni pekerjaan pokok sebagai petani, meliputi : petani pemilik (8 orang), petani penggarap (10 orang) dan buruh tani (14 orang).

Secara rinci tentang jenis pekerjaan pokok pasangan responden dan rata-rata pendapatan pasangan mereka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.21.**  
**Jenis Pekerjaan Pokok Pasangan Responden dan**  
**Rata-rata Pendapatan Pasangan Responden**  
**(Dalam Sebulan)**

Jenis Pekerjaan Pokok Pasangan Responden	Rata-rata Pendapatan Pasangan Responden											
	< Rp. 500.000,-		Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-		Rp. 1.000.001,-s/d Rp. 1.500.000,-		Rp. 1.500.001,-s/d Rp. 2.000.000,-		> Rp. 2.000.000,-		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Petani Pemilik	0	00,00 00,00	5	62,50 21,74	3	37,50 60,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	8	100,00 16,00
Petani Penggarap	4	40,00 19,05	5	50,00 21,74	1	10,00 20,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	10	100,00 20,00
Buruh Tani	9	64,29 42,86	5	35,71 21,74	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	14	100,00 28,00
Buruh Bangunan	6	75,00 28,57	2	25,00 08,69	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	8	100,00 16,00
Pegawai Negeri Sipil	2	33,33 09,52	3	50,00 13,05	0	00,00 00,00	1	16,67 100,00	0	00,00 00,00	6	100,00 12,00
Pegawai Swasta	0	00,00 00,00	1	100,00 04,35	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	1	100,00 02,00
Wiraswasta	0	00,00 00,00	2	66,67 08,69	1	33,33 20,00	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	3	100,00 06,00
Jumlah	21	42,00 100,00	23	46,00 100,00	5	10,00 100,00	1	02,00 100,00	0	00,00 100,00	50	100,00 100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Hasil penelitian yang terkait dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh suami dari pekerjaan pokok yang mereka tekuni dapat disebutkan sebagai berikut : Ada sebanyak 21 orang (42,00 %) suami yang berpendapatan kurang dari Rp. 500.000,- sebulan, mereka terdiri dari sebanyak 4 orang yang bermata pencaharian sebagai petani penggarap, kemudian sebanyak 9 orang bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebanyak 6 orang bekerja sebagai buruh bangunan dan ada 2 orang yang memiliki pekerjaan pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya rata-rata pendapatan suami berkisar antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- diketahui sebanyak 23 orang, dari jumlah tersebut ada sebanyak masing-masing 5 orang berprofesi sebagai petani pemilik, petani penggarap dan buruh tani; lalu masing-masing ada sebanyak 2 orang berprofesi sebagai buruh bangunan dan wiraswasta, ada sebanyak 3 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang menekuni pekerjaan sebagai Pegawai Swasta. Sedangkan suami yang berpendapatan antara Rp. 1.000.001,- hingga Rp. 1.500.000,- diketahui sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 3 orang yang berprofesi sebagai petani pemilik, dan masing-masing sebanyak 1 orang yang memiliki mata pencaharian pokok

sebagai petani penggarap dan wiraswasta. Selanjutnya hanya 1 orang saja ditemukan penghasilan pekerjaan pokok suami (pasangan) adalah antara Rp. 1.500.001 s/d Rp. 2.000.000,-.

Melihat jumlah penghasilan dari pekerjaan pokok suami (pasangan) nampaknya pekerjaan pokok yang ditekuni suami (pasangan) dipandang kurang mencukupi kebutuhan keluarga mereka, dengan berkembangnya lokasi wisata di sekitar Pantai Kuwaru inipun juga dijadikan sebagai ajang untuk menambah pendapatan para pasangan (suami) responden, diantaranya mereka selain menekuni pekerjaan pokok di atas, juga bekerja sebagai nelayan, tukang parkir, bekerja di tempat pelelangan ikan, menyewakan tempat dan tikar untuk para pengunjung dan juga membantu pekerjaan istri mereka berjualan kuliner di sekitar lokasi wisata.

Guna melihat status sosial ekonomi keluarga responden diperlukan beberapa parameter diantaranya : pendidikan responden dan pasangan, kemudian jenis pekerjaan responden dan pasangan, pendapatan yang diperoleh keluarga dan juga kondisi rumah dari keluarga responden. Tabel di bawah akan menyajikan mengenai kondisi rumah keluarga responden yang akan diuraikan lebih lengkap dalam paparan berikut ini.

**Tabel 5.22.**  
**Kondisi Rumah Keluarga Responden**

<b>Kondisi Rumah Keluarga Responden</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Atap Rumah</b>		
1. Genting beton	2	04,00
2. Asbes	3	06,00
3. Genting tanah liat	43	86,00
4. Seng	2	04,00
Total	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>Lantai</b>		
1. Keramik	12	24,00
2. Tegel abu-abu	16	32,00
3. Plesteran	15	30,00
4. Tanah	7	14,00
Total	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>Penerangan</b>		
1. Listrik	38	76,00
2. Lampu petromaks	7	14,00
3. Lampu minyak	5	10,00
Total	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>Sumber Air</b>		
1. PAM	12	24,00
2. Air Sumur	31	62,00
3. Air Sungai	7	14,00
Total	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>Bahan Bakar</b>		
1. Gas Elpiji	18	36,00
2. Minyak tanah	10	20,00

3. Kayu bakar	22	44,00
Total	50	100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Data di atas menunjukkan bahwa atap rumah keluarga responden sebagian besar adalah genting tanah liat (86,00 %). Hal ini seperti atap rumah yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk yang berdomisili di desa. Lantai rumah sebagian besar keluarga responden adalah berupa tegel (32,00 %) dan juga plesteran (30,00 %). Selanjutnya penerangan yang sering dipergunakan oleh sebagian besar keluarga responden adalah listrik (76,00 %), jenis penerangan listrik dipergunakan oleh sebagian besar keluarga responden karena listrik telah masuk dan menjadi penerangan pokok di desa tempat lokasi penelitian. Sumber air yang dipergunakan oleh sebagian besar keluarga responden adalah air sumur (62,00 %), dan bahan bakar yang dipergunakan oleh sebagian besar keluarga responden adalah : kayu bakar (44,00 %) dan gas elpiji (36,00 %). Untuk bahan bakar yang dipergunakan oleh sebagian besar keluarga responden kurang meminati dengan menggunakan minyak tanah, disebabkan oleh mahalnya harga minyak tanah yang ada di lokasi penelitian ini, apalagi dengan adanya subsidi pemerintah terkait dengan gas elpiji 3 kilogram yang secara gratis diberikan kepada masyarakat desa, dan untuk kayu bakar dipilih dengan pertimbangan akses kemudahan untuk mencarinya. Dengan beberapa alasan tersebut maka membuat masyarakat setempat lebih memilih menggunakan gas elpiji ataupun kayu bakar sebagai bahan bakar di rumah mereka.

Berdasarkan kondisi rumah dan beberapa instrumen status sosial ekonomi lainnya, maka dapat diketahui bahwa kondisi keluarga responden rata-rata cenderung masih tergolong dalam kategori rendah menuju ke menengah. Hal tersebut disebabkan dari sisi tingkat pendidikan, pendapatan dan kondisi rumah responden masuk dalam kategori rendah yang menuju kepada kategori menengah.

Ternak oleh sebagian besar penduduk di perdesaan masih dianggap sebagai harta milik yang sangat berharga, oleh karenanya kepemilikan ternak di desa merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh keluarga selama mereka memiliki uang. Ternak sebagai asset keluarga dan kepemilikan ternak tersebut masih dianggap sebagai capaian pretise suatu keluarga di desa.

Jumlah ternak ayam (84,00 %) adalah yang paling banyak dimiliki oleh keluarga responden, kemudian ternak kambing menduduki peringkat kedua yang paling banyak dimiliki oleh keluarga responden (68,00 %), lalu ternak sapi (56,00 %) menduduki peringkat ketiga dan terakhir adalah ternak itik (22,00 %).

Sebagian besar responden jika memiliki uang maka cenderung membelikan ternak seperti sapi dan kambing untuk simpanan atau tabungan keluarga. Tabungan keluarga akan

diwujudkan dalam bentuk uang lagi jika mereka memperoleh kesulitan keuangan ketika mata pencaharian sebagai petani tidak dapat diharapkan, kemudian juga ketika keluarga responden membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak dan jika mereka memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat mendadak. Semakin banyak jumlah ternak terutama ternak-ternak besar seperti sapi dan kambing tentunya semakin kaya keluarga yang bersangkutan dan semakin sedikit kepemilikan ternak dan jenis ternak yang dimiliki cenderung semakin miskin keluarga tersebut.

Namun jika disimak untuk kasus kepemilikan ternak di lokasi penelitian ini, maka kepemilikan ternak yang dilakukan oleh keluarga responden hanya sekedar untuk tabungan sementara. Hal ini disebabkan tabungan mereka tidak untuk jangka panjang tetapi membeli ternak ketika memiliki uang dan akan segera menjualnya kembali ketika ada desakan kebutuhan keluarga. Dengan demikian melihat kondisi di lokasi penelitian ini, belumlah dapat dikatakan bahwa semakin banyak kepemilikan ternak berdasarkan jenis yang dimiliki oleh keluarga responden maka keluarga responden tersebut semakin kaya. Seperti telah disebutkan terdahulu kepemilikan ternak hanya merupakan alat tabungan sementara sehingga akan segera dijual jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi oleh keluarga yang bersangkutan.

**Tabel 5.23.**  
**Kepemilikan Ternak Oleh Keluarga Responden**

<b>Kepemilikan Ternak Oleh Keluarga Responden</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>
Sapi	28	56,00	37
Kambing	34	68,00	49
Itik	11	22,00	35
Ayam	42	84,00	126

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

#### **5.3.4.2. Peran Gender Dalam Keluarga Responden**

Pembagian kerja seksual adalah pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Di kebanyakan masyarakat ada pembagian kerja seksual di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Pembagian tugas seperti ini sering digunakan istilah gender.

Gender adalah keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan.

Pembagian kerja secara seksual mengandung makna bahwa perempuan kerap dipandang sebagai pencari nafkah sekunder dalam keluarga, sedangkan laki-laki penyedia nafkah utama, tanpa memandang faktanya apakah memang demikian. Dalam kenyataannya, kerja yang dilakukan oleh sebagian besar perempuan miskinlah yang memungkinkan keluarga mereka tetap bertahan hidup, semakin miskin suatu keluarga maka semakin tergantung kepada produktivitas ekonomi seorang perempuan.

Sebagian besar perempuan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan dalam sektor formal, namun untuk memenuhi tanggung jawabnya atas anak-anak dan atas penyediaan pangan bagi keluarga maka memaksa perempuan untuk melakukan pekerjaan apa saja agar mereka memperoleh uang tunai. Untuk itu jenis pekerjaan di sektor informal seperti pekerjaan sebagai pedagang, sebagai pembantu rumah tangga (*domestic servants*), dan banyak pekerjaan berupah rendah lainnya yang terpaksa harus dipilihnya.

Dalam struktur dan kultur yang berkembang di masyarakat, ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat sebagai pemelihara dan memiliki kerajinan, serta tidak cocok untuk mengepalai sebuah rumah tangga, sehingga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Oleh karena itu konsekuensi dari anggapan tersebut, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian dalam rumah tangganya, yakni mulai dari pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan masyarakat desa biasanya beban sangat berat ditanggung sendiri oleh perempuan, karena tidak ada orang lain yang dapat membantu tugas-tugas domestik yang dibebankan kepadanya. Terlebih-lebih jika perempuan desa tersebut dari kalangan masyarakat miskin, karena selain beban domestik yang harus ditanggung perempuan, mereka juga harus bekerja mencari nafkah. Dengan demikian maka perempuan akan memikul beban kerja yang bersifat ganda.

Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan domestik responden dan pasangan responden, berikut akan disajikan tabel tentang alokasi waktu untuk kegiatan domestik responden (perempuan) dengan kegiatan domestik pasangannya (laki-laki).

**Tabel 5.24.**

## Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Domestik Responden dan Pasangan Responden

Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Domestik Responden	Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Domestik Pasangan Responden							
	≤ 3 Jam		4 – 7 Jam		> 7 Jam		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 3 Jam	0	00,00 00,00	2	66,67 10,53	1	33,33 100,00	3	100,00 06,00
4 – 7 Jam	10	62,50 33,33	6	37,50 31,58	0	00,00 00,00	16	100,00 32,00
> 7 Jam	20	64,52 66,67	11	35,48 57,89	0	00,00 00,00	31	100,00 62,00
Jumlah	30	60,00 100,00	19	38,00 100,00	1	02,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011

Tabel di atas memperlihatkan alokasi kegiatan domestik yang dilakukan oleh responden dan pasangan responden dalam keluarga mereka. Berdasarkan alokasi kegiatan domestik ini nampak bahwa alokasi waktu kegiatan sektor domestik perempuan cenderung lebih lama jika dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang mencurahkan alokasi waktu untuk keperluan sektor domestik lebih dari 7 jam ada sebanyak 31 orang (62,00 %) dan ada sebanyak 16 orang (32,00 %) yang menyatakan alokasi waktu perempuan di sektor domestik antara 4 sampai 7 jam, sedangkan laki-laki yang mengalokasikan waktu untuk kegiatan sektor domestik lebih dari 7 jam hanya ditemukan sebanyak 1 orang saja dan ada sebanyak 19 orang (38,00 %) pasangan responden (laki-laki) yang mengalokasikan waktunya untuk sektor domestik antara 4 sampai 7 jam dalam sehari. Sedangkan jika dilihat perbandingan banyaknya

**responden dan pasangan responden yang mengalokasikan waktu pada kegiatan domestik  $\leq 3$  jam dalam sehari untuk pasangan responden (laki-laki) ada sebanyak 30 orang (60,00 %) dan ada sebanyak 3 orang (06,00 %) saja responden (perempuan) yang menyatakan alokasi waktu untuk kegiatan domestik  $\leq 3$  jam dalam sehari.**

**Jenis kegiatan domestik yang sering dikerjakan oleh perempuan adalah : berbelanja, memasak, menyiapkan makan untuk keluarga, mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan dan menyapu lantai, mengasuh dan merawat anak, memberi pakan untuk ternak, membersihkan kandang ternak. Sementara itu jenis kegiatan domestik yang biasa dilakukan laki-laki adalah : menimba air, mencari kayu bakar, memperbaiki rumah, mencari pakan ternak.**

**Melihat hasil seperti tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembagian kerja berdasarkan seksual masih terlihat jelas di lokasi penelitian ini. Pembagian kerja semacam ini juga ditunjang adanya mitos sosial di masyarakat. Yakni ada kecenderungan yang menempatkan laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik. Mitos semacam ini melahirkan ketimpangan kekuasaan yang berkepanjangan antara kedua jenis kelamin ini. Perempuan dianggap lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala aktivitas yang ada keterkaitannya dengan rumah tangga (kegiatan**



domestik), sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam bidang kegiatan publik (dunia kerja) seperti bidang ekonomi, politik atau institusi-institusi lainnya.

Membiarkan kesalahan mitos sosial dan pemahaman yang bias gender tidak menjunjung tinggi keadilan dan akhirnya akan menghambat terbentuknya kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kesetaraan gender menjadi suatu keharusan yang perlu ditegakkan, prinsip kesetaraan jika disikapi dengan arif akan membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi mitra laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan.

Tabel 5.25.

### Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Publik Responden dan Pasangan Responden

Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Publik Responden	Alokasi Waktu Untuk Kegiatan Publik Pasangan Responden							
	≤ 3 Jam		4 – 7 Jam		> 7 Jam		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 3 Jam	1	12,50 25,00	2	25,00 11,11	5	62,50 17,86	8	100,00 16,00
4 – 7 Jam	2	12,50 50,00	3	18,75 16,68	11	68,75 39,28	16	100,00 32,00
> 7 Jam	1	03,85 25,00	13	50,00 72,22	12	46,15 42,86	26	100,00 52,00
Jumlah	4	08,00 100,00	18	36,00 100,00	28	56,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011

Seperti telah dijelaskan di muka, perempuan mengalokasikan waktu mereka untuk berdagang kuliner di warung sekitar pantai, ini terutama dilakukan perempuan pada hari-hari libur, karena pada hari liburlah tempat wisata di sekitar Pantai Kuwaru ramai dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu kegiatan publik produktif perempuan sebagian besar ada di sekitar pantai yakni dengan berjualan di warung yang menjual hasil tangkapan nelayan dan makanan kuliner lainnya. Sementara itu kegiatan publik produktif laki-laki rata-rata ada di sekitar sawah

atau tegalan pada masa tanam padi dan sayuran, kerja kantoran, menjadi buruh dan juga ada yang di lautan ketika musim panen ikan tiba.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa alokasi waktu untuk kegiatan sektor publik rata-rata perempuan hampir sama dengan kegiatan sektor publik yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang menunjukkan ada sebanyak 26 orang perempuan (responden) atau sebesar 52,00 % yang mengalokasikan waktu untuk kegiatan sektor publik lebih dari 7 jam setiap harinya, sementara itu ada sebanyak 28 orang (56,00 %) laki-laki atau pasangan responden yang mengalokasikan waktu pada sektor publik lebih dari 7 jam dalam setiap harinya. Melihat komposisi yang demikian memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di sektor publik pada lokasi penelitian ini tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan partisipasi publik laki-laki. Kegiatan sektor publik perempuan di lokasi penelitian, sebagai akibat berkembangnya pariwisata pantai, sehingga mereka dapat berpartisipasi untuk memasuki usaha di sektor kuliner yakni dengan berdagang di warung-warung sekitar Pantai Kuwaru.

Pada penelitian ini diketahui pula ada sebanyak 18 orang pasangan responden atau laki-laki (36,00 %) yang mengalokasikan waktu di sektor publik sebanyak 4-7 jam sehari, sementara itu jumlah responden (perempuan) yang mengalokasikan waktu untuk sektor publik pada alokasi jam yang sama ada sebanyak 16 orang (32,00 %). Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah laki-laki dan perempuan yang memiliki alokasi jumlah jam dalam seharinya antara 4-7 jam di sektor publik tidaklah berbeda banyak, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase yang diperoleh dalam penelitian ini.

Sementara itu jumlah jam kerja untuk sektor publik yang berkisar  $\leq 3$  jam dalam sehari menunjukkan pada proporsi sebagai berikut : laki-laki sebanyak 4 orang (08,00 %) dan perempuan sebanyak 8 orang (16,00 %). Hasil ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada yang beranggapan tentang pendikotomisan antara peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki masih dipersiapkan sebagai orang berperan dalam pencarian nafkah bagi keluarga terlepas jumlah yang dihasilkan suami atau laki-laki bisa atau belum bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sementara itu apabila perempuan bekerja di sektor domestik dirasa masih sebatas untuk membantu kebutuhan keluarga, sehingga peran perempuan di sektor publik baru sebatas pada peran yang bersifat memperoleh hasil tambahan atau dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal sebagai pencari nafkah tambahan.

Tabel 5.26.

## Alokasi Waktu Untuk Keperluan Pribadi Responden dan Pasangan Responden

Alokasi Waktu Untuk Keperluan Pribadi Responden	Alokasi Waktu Untuk Keperluan Pribadi Pasangan Responden							
	≤ 3 Jam		4 – 7 Jam		> 7 Jam		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 3 Jam	2	07,69 40,00	16	61,54 51,61	8	30,77 57,14	26	100,00 52,00
4 – 7 Jam	2	10,00 40,00	13	65,00 41,94	5	25,00 35,72	20	100,00 40,00
> 7 Jam	1	25,00 20,00	2	50,00 06,45	1	25,00 07,14	4	100,00 08,00
Jumlah	5	10,00 100,00	31	62,00 100,00	14	28,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011

Padatnya jam kerja yang harus dialokasikan responden (perempuan) dalam sektor domestik dan publik, tidak mengurangi alokasi waktu yang digunakan perempuan untuk keperluan pribadinya, demikian juga halnya dengan pasangan responden (laki-laki) pun juga memiliki alokasi waktu untuk keperluan pribadinya. Pemenuhan keperluan pribadi sangatlah diperlukan perempuan dan laki-laki guna mengembangkan dirinya.

Hasil penelitian mengenai alokasi waktu pribadi yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa : sebagian besar perempuan yakni 52,00 % dari total keseluruhan responden hanya dapat menyisihkan waktu mereka bagi kepentingan pribadinya kurang dari 3 jam rata-rata dalam sehari, sedangkan laki-laki yang menyisihkan waktu kurang dari 3 jam sehari hanya ada 5 orang saja (10,00 %). Sementara perempuan yang dapat menyisihkan waktu untuk urusan pribadi mereka rata-rata lebih dari 7 jam ada sebanyak 4 orang (08,00 %), akan tetapi laki-laki yang dapat mengalokasikan waktu dengan besaran yang sama ada sebanyak 14 orang (28,00 %).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata laki-laki lebih banyak mempunyai waktu untuk mengembangkan dirinya daripada perempuan yakni dengan mengalokasikan waktu mereka dalam aktivitas kepentingan pribadinya. Sementara perempuan kurang dapat mengembangkan diri mereka karena adanya keterbatasan waktu yang dimilikinya.

Alokasi waktu perempuan untuk keperluan pribadi ini meliputi : aktivitas arisan, menengok orang sakit, menengok tetangga yang melahirkan, melayat jika ada tetangga yang meninggal. Sedangkan aktivitas pribadi laki-laki adalah terdiri dari : kegiatan arisan, mengikuti ronda, ngobrol dan bincang-bincang dengan tetangga atau orang Jawa menyebutnya dengan

istilah “kongko-kongko”, menengok orang sakit, melayat jika ada yang meninggal, kerja bakti, rapat RT, rapat koperasi, dan lain sebagainya.

Melihat jenis dan variasi kegiatan yang nampak bisa dipastikan laki-laki lebih mempunyai waktu dan wadah untuk mengembangkan dirinya, sehingga konstruksi bias gender yang terjadi di masyarakat secara umum masih dapat dirasakan pada struktur masyarakat perdesaan pada umumnya dan masyarakat sekitar pesisir pada khususnya. Meskipun jika dilihat lebih seksama aktivitas perempuan di sektor publik telah banyak mendukung bagi kepentingan keluarga dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian agar ada keadilan gender maka diperlukan suatu dekonstruksi dari mitos-mitos gender dan kultur yang berkembang di masyarakat serta merugikan untuk pengembangan potensi diri perempuan itu sendiri.

**Tabel 5.27.**

### **Alokasi Waktu Untuk Seluruh Aktivitas Keseharian Responden dan Pasangan Responden**

Alokasi Waktu Untuk Seluruh Aktivitas Keseharian Responden	Alokasi Waktu Untuk Seluruh Aktivitas Keseharian Pasangan Responden							
	≤ 7 Jam		8 – 12 Jam		> 12 Jam		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%
≤ 7 Jam	2	28,57 20,00	4	57,14 28,58	1	14,29 03,85	7	100,00 14,00
8 – 12 Jam	3	20,00 30,00	5	33,33 35,71	7	46,67 26,92	15	100,00 30,00
> 12 Jam	5	17,86 50,00	5	17,86 35,71	18	64,28 69,23	28	100,00 56,00
Jumlah	10	20,00 100,00	14	28,00 100,00	26	52,00 100,00	50	100,00 100,00

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

Alokasi waktu untuk aktivitas keseharian meliputi alokasi waktu untuk keperluan kegiatan domestik, publik dan pribadi. Rata-rata alokasi waktu yang diberikan responden (perempuan) maupun pasangan responden (laki-laki) untuk ketiga aktivitas tersebut hampir sama, ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada sebanyak 28 orang (56,00 %) responden (perempuan) mengalokasikan waktunya untuk ketiga aktivitas itu lebih dari 12 jam sehari, demikian juga pasangan responden (laki-laki) sebagian besar yakni sebanyak 26 orang (52,00 %) mengalokasikan waktu mereka juga lebih dari 12 jam dalam sehari.

Jumlah laki-laki yang mengalokasikan waktu untuk seluruh aktivitas keseharian ≤ 7 jam sehari lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut nampak dari hasil yang memperlihatkan ada sebanyak 10 orang (20,00 %) laki-laki yang mengalokasikan waktu dalam

jumlah jam yang telah disebutkan di atas dan hanya ada sebanyak 7 orang (14,00 %) perempuan yang mempunyai alokasi waktu dalam jumlah yang sama.

Alokasi waktu yang demikian ini dirasa masih belum adil terhadap pembagian kerja berdasarkan seksual dalam keluarga, terlebih perempuan telah mengalokasikan waktu mereka di sektor publik akan tetapi mereka juga harus mengalokasikan waktu yang cukup banyak untuk aktivitas sektor domestik. Oleh karena itu agar ada waktu yang cukup bagi perempuan dalam mengembangkan aktivitas pribadinya, yang secara tidak langsung dapat dipergunakan untuk mengembangkan kualitas sumber dayanya, maka diperlukan adanya penyadaran gender baik dari pihak istri dan terutama dari pihak suami untuk bersama-sama saling bahu membahu dalam menyelesaikan semua aktivitas keseharian dan mewujudkan kesejahteraan keluarga mereka.

Berikut ini disajikan tabel mengenai aktivitas yang dilakukan sepasang suami istri dalam melaksanakan aktivitas keseharian mereka.

**Tabel 5.28.**

### **Alokasi Waktu Kegiatan Sepasang Suami Istri**

<b>Ibu R</b>		<b>Pak S</b>	
<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
03.00 – 03.15	Bangun pagi, berdoa		
03.15 – 04.00	Mandi, memasak	03.30 – 03.45	Bangun pagi, berdoa
04.00 – 06.00	Mengurus anak	03.45 – 04.00	Mandi dan sarapan
06.00 – 07.00	Membersihkan rumah dan kandang	04.00 – 13.00	Berlayar mencari ikan
07.00 – 15.00	Berjualan ikan di warung	13.00 – 14.30	Ke sawah dan mencari rumput
15.00 – 16.00	Mencuci baju	14.30 – 16.00	Istirahat
16.00 – 17.00	Memasak dan menyiapkan makan sore untuk keluarga	16.00 – 16.30	Mandi
17.00 – 18.00	Memandikan anak, mencuci piring	16.30 – 19.30	Aktivitas pribadi dan sosial kemasyarakatan
18.00 – 18.30	Mandi		
18.30 – 21.30	Menyisihkan waktu untuk anak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya		

**Sumber : Data Primer Diolah tahun 2011**

**Berdasarkan aktivitas sepasang suami istri dapat dilihat mengenai pembagian kerja yang terjadi dalam keluarga nelayan.**

**Kasus Ibu R dan Pak S, menggambarkan curahan tenaga dan**

**waktu perempuan yang bertanggungjawab bukan hanya di sektor publik melainkan juga di sektor domestik. Dibandingkan Pak S, Ibu R mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih besar karena tugas rumah tangga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ibu R. Partisipasi Ibu R di sektor publik tidak membuat Pak S membantu istrinya di sektor domestik.**

Berbagai studi tentang curahan waktu perempuan di sektor domestik dan publik menunjukkan rata-rata perempuan mencurahkan waktu 13-15 jam sehari untuk melakukan pekerjaan domestik dan publik sekaligus. Sementara itu, curahan waktu laki-laki sebanyak  $\pm$  8-10 jam sehari, bila diasumsikan laki-laki hanya bekerja di sektor publik dan tidak terlibat dalam pekerjaan domestik.

#### **5.3.4.3. Komoditas Perempuan Berbasis Potensi Lokal**

##### **5.3.4.3.1. Kegiatan Perempuan pada Aktivitas Kuliner di Sekitar Pantai Kuwaru**

Kondisi ekonomi keluarga petani seringkali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seperti halnya yang dilakukan kelompok perempuan tani di Dusun Kuwaru dengan turun langsung bertani dan membuka usaha di bidang kuliner. Upaya-upaya yang dilakukan perempuan tani ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung dari pertanian. Peran serta para perempuan tani ini di bidang pertanian mulai dari penanaman, penyiangan, panen hingga pengolahan pasca panen.

Aktivitas di bidang kuliner dilakukan perempuan dikarenakan penghasilan mereka dari sektor pertanian dirasa kurang mencukupi kebutuhan keluarga, dengan demikian para perempuan memanfaatkan situasi yang ada untuk menambah pendapatan keluarga dengan berjualan kuliner di warung-warung sekitar wisata Pantai Kuwaru.



### **Gambar 5.10. Salah Satu Warung Kuliner dan Pedagang Ikan di Kuwaru**

Dengan demikian selain berperan aktif di bidang pertanian, kelompok perempuan tani di Dusun Kuwaru juga memiliki aktivitas lainnya yakni mengolah hasil perikanan dan mereka juga membuka usaha di bidang kuliner. Dengan kondisi lingkungan sekitar yang banyak menghasilkan produk perikanan, maka selanjutnya kelompok perempuan yang ada di Dusun Kuwaru memilih hasil perikanan sebagai menu andalannya. Untuk pengembangan usaha berbagai makanan ringan dan makanan berat dengan menu andalan hasil tangkapan perikanan diproduksi. Keuntungan yang diperoleh kios ini sekitar Rp. 500.000 tiap bulannya. “Perolehan keuntungan tersebut 50% untuk pengembangan usaha, 25% untuk sewa tanah dan 25% untuk dana cadangan. Anggota yang bertugas menjaga warung memperoleh upah Rp. 25 – 30 ribu perhari”, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rukidah (nama samara) sebagai salah satu pemilik warung kuliner di sekitar lokasi wisata Pantai Kuwaru.

Berikut beberapa gambar tentang situasi dan kondisi Pantai Kuwaru dan aktivitas yang bisa ditemukan di lokasi Pantai Kuwaru, diantaranya : lokasi warung-warung kuliner di sekitar pantai, penjualan ikan, beberapa menu kuliner, penyewaan permainan motor, keadaan pantai di sekitar Pantai Kuwaru.





**Gambar 5.11. Lapak Sekitar Kuwaru dan Aktivitas Kuliner**



**Gambar 5.12. Pedagang Ikan Mentah, Suasana Teduh Sekitar Lapak, Keramaian di Pantai dan Penyewaan Motor ATV di Pantai Kuwaru**

Pantai Kuwaru, terletak di barat daya kota Yogyakarta, sebelah timur Pantai Pandansimo. Suasana yang sejuk, rindang karena cemara yang tumbuh subur, menyuguhkan pesona tersendiri. Hanya karena mungkin tempat ini termasuk “baru” , penataannya masih terus menerus dilakukan. Di pantai ini, seperti pantai-pantai yang lain, juga ada Tempat Pelelangan Ikannya ( TPI ) yang digunakan apabila ada perahu yang melaut dan melelang hasil tangkapannya. Tetapi tidak setiap hari perahu-perahu disini bisa melaut, karena sangat tergantung oleh cuaca, musim dan kondisi ketenangan air laut. Tetapi bagi pengunjung tidak perlu khawatir karena stok ikan ada terus, yang didatangkan dari luar.

Beberapa tahun yang lalu, pantai ini tidak lebih dari pantai biasa yang hanya dikunjungi orang-orang mempunyai hobi mancing di laut. Apalagi setelah gempa 27 Mei 2006, kawasan pantai seakan kehilangan ‘peminat’. Lambat laun, seiring hilangnya rasa khawatir akan adanya tsunami, juga seiring tumbuhnya pepohonan yang ditanam di sepanjang pantai menumbuhkan pesona tersendiri di pantai ini. Disini pengunjung juga bisa menikmati ikan laut goreng atau bakar. Juga ada lapak-lapak (pedangang kakilima) warga asli Kuwaru yang menjajakan dagangannya. Dengan iklim yang sangat religius, disini ada banyak jajanan yang ditawarkan. Satu hal lagi keunggulan di pantai ini yaitu kondisi yang ‘steril’ akan prostitusi.



Berikut wawancara yang diperoleh dari hasil penelitian dengan salah seorang responden bernama Suryati (nama samara) tentang perkembangan Pantai Kuwaru dan riwayatnya berjualan kuliner di Pantai Kuwaru.

“Saya ingat, ketika saya masih SD. Saya dari kecil diasuh nenek saya di Kulon Progo. Setiap Sabtu sore saya pulang ke Kuwaru. Ketika pulang ke Kuwaru, saya selalu merengek ke bapak saya untuk mengantar saya ke pantai. Waktu itu, akses ke pantai belum sebegitu sekarang. Jalan menuju ke pantai belum ada aspal. Masih pasir, kiri kanan banyak sekali tumbuh pohon pandan yang sangat rimbun. dan kalau kita membawa sepeda atau motor harus ditinggal jauh di utara pantai karena belum ada jembatan yang menghubungkan dusun Kuwaru dengan kawasan pantai Kuwaru. Dusun saya dengan pantai di pisahkan oleh sebuah kali (sungai). Bapak saya selalu menggondong saya menyeberang kali itu untuk bisa sampai ke pantai. Tetapi waktu itu sudah ada warga Kuwaru yang sudah sejak lama tinggal persis di utara pantai. Dan rumahnya hanya beberapa ratus meter dari bibir pantai. Namanya Mbah Kromo. Sekarang dengan terus ditingkatkannya pembangunan struktur dan infrastruktur oleh pemerintah, jembatan sudah ada walaupun hanya kecil tetapi mampu dilalui bis, jalan sudah aspal, dan akses ke pantai lancar. Saya menjadi semakin bangga akan pantai yang penuh pesona ini.

Saya mempunyai lapak disana. Konsepnya tenda. Saya pasang tenda yang berwarna orange. Agar lain dengan lapak-lapak yang ada disana. Di lapak ini saya menjual sup buah segar dan lotis yang segar juga, yang bisa dinikmati sambil memandangi keindahan laut lepas. Dibawah pohon cemara yang sangat rimbun, dan rindang, anda juga bisa memesan pecel lele atau ikan laut di tenda saya. Saya berjualan setiap siang, hari Minggu, atau hari libur nasional. Atau bukan bulan puasa. Tetapi tidak usah khawatir. Disana ada juga warung makan yang permanen, yang siap melayani setiap hari”.

Pantai Kuwaru dengan pedagang kakilimanya akan menambah semarak suasana layaknya sebuah tempat wisata. Hal ini disebut seperti itu karena obyek wisata ini benar-benar baru, dan masih sangat perlu berbenah diri. Penataan swadaya yang dilakukan oleh kelompok nelayan bersama paguyuban pedagang kakilima disana terus dilakukan demi terciptanya iklim berkunjung yang menyenangkan dan nyaman. Penataan sana-sini terus menerus dilakukan tanpa henti. Untuk menyambut kedatangan pengunjung yang terus menerus meningkat.

Pedagang kakilima yang berjualan di pantai ini semua warga Kuwaru asli. Bukannya pengelola tidak ingin investor dari luar masuk, hanya saja berdasarkan kesepakatan dan keputusan dari rapat pengurus paguyuban pedagang kakilima, pengurus memang belum memandang perlu memperbolehkan pedagang dari luar untuk masuk.

Pedagang kakilima yang sudah terbentuk paguyubannya ini juga mempunyai AD/ART sebagai pijakan berjalannya sebuah paguyuban. Nama dari paguyuban pedagang kakilima (lapak) pantai Kuwaru adalah “CEMARA ASRI “. Semua itu dibentuk demi lancar dan tertibnya pedagang-pedagang dalam menjajakan dagangannya. tetapi dipantai ini kita tidak bisa berharap untuk menjumpai hotel, losmen, atau mungkin warung remang-remang seperti obyek wisata di

tempat-tempat lain. Karena untuk menjaga iklim tetap “steril” dari praktek prostitusi dan perbuatan maksiat lainnya dan sebisa mungkin tetap bernuansa religious, pengelola bahkan alim ulama Dusun Kuwaru melarang keras adanya bangunan yang bersifat penginapan.

Pantai ini bisa menjadi alternatif yang sangat bagus diantara pantai-pantai di selatan Kabupaten Bantul. Selama liburan Lebaran ini, obyek wisata kuliner *sea food* Pantai Kuwaru, Kabupaten Bantul, dibanjiri pengunjung. Mereka tidak hanya sekedar melihat keindahan pantai, tetapi yang utama adalah ingin mencicipi kelezatan masakan *sea food* yang ada di pantai itu.

Para pengunjung tidak hanya datang dari Bantul, tetapi juga banyak datang dari luar Kota Yogyakarta yang kebetulan sedang merayakan Hari Raya Lebaran di kota itu. Semua itu, bisa dilihat dari plat nomor kendaraan yang mereka gunakan yang kebanyakan datang dari luar kota. Selain membawa kendaraan pribadi, sebagian pengunjung datang secara berombongan menumpang bus.

Selama berkunjung ke pantai itu, mereka bisa menikmati berbagai jenis masakan *sea food* sambil menikmati keindahan dan deburan ombak pantai selatan. "Pantai ini lebih enak dan teduh, karena banyak pepohonan,". Meski belum begitu terkenal sebagai pantai yang menyediakan olahan makanan ikan segar dari hasil tangkapan di laut, namun belakangan ini tempat itu menjadi salah satu alternatif wisata kuliner.

Sutari salah seorang pemilik warung *sea food* di Pantai Kuwaru menyatakan sebagai berikut :

“.....dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini kunjungan wisata di Pantai Kuwaru semakin banyak, meski belum seramai Pantai Depok maupun Pantai Parangtritis. Bahkan saat libur akhir pekan maupun libur panjang dipastikan ribuan wisatawan datang ke Pantai Kuwaru ini, baik untuk menikmati *sea food* maupun hanya sekedar melihat laut sembari berteduh di bawah pohon cemara udang. Untuk memasak hingga menyiapkan makanan siap saji, biayanya dihitung perkilo ikan untuk dimasakkan. Biaya masak untuk setiap kilonya berkisar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 sesuai keinginan selera wisatawan.”

Sementara itu menurut pendapat salah seorang responden yang bernama Anis (nama samaran), harga ikan dan makan laut yang ada di sekitar Pantai Kuwaru terjangkau bagi para pembelinya, berikut hasil wawancaranya :

“.....setiap hari saya menyiapkan ikan antara 50 kilogram hingga 100 kilogram ikan laut dari berbagai jenis. Mulai ikan dengan harga Rp 10.000 untuk setiap satu kilogramnya hingga Rp 40.000 perkilogramnya. Untuk ikan cakalang, saya jual dalam kisaran Rp 14.000/kilogramnya, ikan tongkol Rp 10.000 pekilonya, cumi-cumi Rp 32.000 perkilonya, udang Rp 35.000 perkilonya. Meski permintaan tinggi, kita sepakat tidak akan memanfaatkan situasi dengan menjual ikan dengan harga yang melonjak tinggi, namun kenaikan harga ikan dalam taraf kewajaran...”

Sebagai tempat wisata kuliner Pantai Kuwaru memang cukup indah dan nyaman, namun yang menjadi persoalannya pihak pengelola maupun warganya masih kurang mengindahkan kebersihan sehingga kawasan itu masih terkesan kurang bersih.

#### **5.3.4.3.2. Pola Relasi dan Jaringan Aktivitas Nelayan, Penjual Ikan dan Pedagang Kuliner Warung di Sekitar Pantai Kuwaru**

Dalam pemenuhan kebutuhan warung para pedagang kuliner di sekitar Pantai Kuwaru dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan para nelayan dan penjual ikan yang ada di daerah sekitar. Pola jual-beli ikan dilakukan dengan sistem “uang pengikat”, sistem tersebut memang tidak selalu merugikan pihak nelayan, penjual ikan (bakul) dan pedagang kuliner di warung, walaupun sebenarnya uang yang dibayarkan saat itu juga atau kemudian oleh para bakul kepada pedagang kuliner warung tidak pernah sama, bahkan lebih rendah dari harga jual riil ikan seandainya dijual langsung di pasar lokal. Artinya, para nelayan atau bakul ikan tersebut akan menerima uang hasil pembelian ikan dari pedagang kuliner warung ‘senantiasa kurang’ dari harga jual ikan di pasaran. Sistem pemberian hasil penjualan “di bawah harga” tersebut berlaku umum atau sama untuk seluruh bakul. Dalam hal ini, tidak ada permainan harga jual antara bakul yang satu dengan bakul yang lain; sehingga jumlah uang yang diterima oleh para nelayan dan para bakul dari pedagang kuliner warung sekitar Pantai Kuwaru, siapapun dia setiap orang adalah setara, tidak ada perbedaan. Bagi bakul ikan sendiri, dengan adanya uang pengikat ini, selain dia dapat menjual harga sesuai dengan keadaan pasar dan jenis ikan yang dijual, dari hasil penjualan ikannya itu dia juga masih mendapatkan keuntungan, yang diperoleh dari selisih antara uang yang diberikan kepada para nelayan dan bakul ikan dengan uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil penjualan ikan tadi kepada pedagang kuliner warung sekitar Pantai Kuwaru.

Kecenderungan para nelayan dan bakul ikan untuk menjual ikan kepada pedagang kuliner warung yang telah “mengikatnya dengan uang pengikat tadi, adalah lebih disebabkan pada pertimbangan kecepatan dan kemudahan menjual ikan serta memperoleh uang, atau hal-hal praktis lainnya daripada semata-mata pertimbangan bisnis-ekonomi yang berorientasi pada mencari untung sebesar-besarnya, sebab bagi para nelayan dan bakul ikan ada risiko yang akan diterima, apabila mereka menjual langsung ikan-ikan tersebut di pasar jalanan (pasar di pinggir jalan), yaitu ada kemungkinan tidak laku, harga jual rendah/murah dan atau apabila mereka bawa ke pasar di luar daerah mereka sendiri, misalnya ke pasar desa, selain masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk transportasi juga belum dapat dipastikan dapat segera laku dengan cepat atau berharga tinggi. Bahkan, apabila ikan yang dijual sendiri tadi

tidak laku, maka ikan-ikan tersebut harus dikeringkan, yang tentunya harga jualnya akan lebih murah dibandingkan apabila dijual dalam bentuk “ikan basah”, di samping perlu uang ekstra untuk biaya pengeringan, serta tenaga.

Hal lain yang menjadi daya tarik dari para nelayan dan bakul ikan melakukan praktik bisnis semacam itu kepada pedagang kuliner warung di sekitar Pantai Kuwaru, adalah karena mereka akan mendapatkan fasilitas tambahan dari para pedagang kuliner warung, yaitu kemudahan untuk mendapatkan hutang atau pinjaman uang dari para pedagang kuliner warung rekanannya; apakah untuk keperluan modal usaha rumah tangga ataupun untuk keperluan keluarga yang lain, yang bagi mereka mungkin tidaklah mudah diperoleh dari orang lain, selain itu bunganya pun tidaklah terlalu tinggi (maksimal 5% perbulan). Para nelayan itu pun secara rutin masih mendapatkan barang-barang lain seperti rokok (ketika dia istirahat, atau tidak melaut), atau ketika menjelang lebaran mereka kembali mendapatkan “sesuatu” dari para pedagang kuliner warung rekanan bisnisnya seperti: pakaian, kopiah, sarung, sandal atau barang-barang kebutuhan lebaran lain untuk keluarga mereka.

Praktik jual-beli di atas, senantiasa dipelihara dan semakin diperkuat; dan dalam hal-hal demikian itu telah menimbulkan hubungan jual-beli yang bersifat “patron-client” (hubungan pelindung-klien) di antara mereka, walaupun hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa pola relasi tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, walaupun bukan merupakan gejala umum seperti halnya hubungan jual-beli antara nelayan, bakul ikan dan pedagang kuliner warung di Pantai Kuwaru seperti di atas, pola jual-beli ikan dengan sistem “uang pengikat” juga terjadi antara para tengkulak ikan yang memberikan uang perangsang dengan para bakul ikan, tetapi pada umumnya di antara mereka terdapat hubungan jual-beli yang relatif bebas sehingga setiap tengkulak dapat menguhungi setiap bakul untuk mendapatkan berbagai jenis ikan yang dibutuhkan atau diminati oleh para pembeli di pasar asal mereka sementara para bakul ikan itu dapat pula secara bebas menjual ikan-ikannya kepada setiap tengkulak sesuai dengan harga pasaran atau harga yang lebih tinggi dari harga penawaran tengkulak yang lain.

Selain sebab-sebab di atas, terjadinya praktik jual-beli ikan dengan sistem “uang pengikat” juga disebabkan oleh kurang berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada, padahal pembangunan TPI tersebut pada awalnya merupakan inisiatif pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memudahkan dan memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi para nelayan, bakul ikan, dan juragan perahu, akan tetapi keberadaan TPI ini hanya efektif pada awal-awal pendiriannya saja, dan sejak beberapa tahun yang lalu semakin tidak diminati oleh para nelayan atau bakul ikan setempat. Sejumlah alasan yang

dikemukakan adalah, karena pasar tidak selalu memberikan respon positif terhadap “hasil harga lelang” yang disepakati di TPI, dikarenakan jaringan pemasaran ikan dari Dusun Kuwaru ini hanya untuk konsumsi pasar-pasar lokal yang berada di daerah sekitar. Juga karena seringkali para pembeli yang telah memberikan “harga tertinggi” di TPI tersebut banyak yang tidak segera melunasi uangnya, malah tidak jarang terjadi penagihan yang tidak kunjung terselesaikan sehingga para pemilik ikan pun merasa dirugikan.

#### **5.3.4.3.3. Kepemimpinan Ekonomi dan Pengembangan Struktur Ekonomi Lokal**

Struktur ekonomi di lokasi wisata Pantai Kuwaru seperti daerah perdesaan lainnya pada umumnya berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal desa, sebagaimana umumnya struktur ekonomi desa lainnya, dibangun dan didukung oleh pola-pola kepemimpinan ekonomi yang juga bersifat “lokal”, serta “pemupukan modal” yang sebenarnya bukan sebagai bentuk investasi dalam pengertian teori ekonomi.

Kepemilikan modal dalam perdagangan ikan dan perdagangan kuliner di Dusun Kuwaru ini tidak terlalu besar, bahkan tidak sedikit dari para bakul ikan yang berperan sebagai “pedagang pemasok dan perantara” dalam aktivitas penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada para pedagang kuliner warung hanya atas dasar prinsip “kepercayaan” (saling percaya), yaitu pada kemampuan atau keahlian mereka untuk meyakinkan para pemilik ikan agar menyerahkan atau menjual ikan kepada dirinya. Selain itu, dalam aktivitas perdagangan ikan di Dusun Kuwaru ini juga terdapat sejumlah pedagang besar dari luar dusun yaitu pelanggan tetap bermodal besar, memiliki gudang atau pabrik pengolahan ikan, serta memiliki jaringan perdagangan di tingkat regional atau ekspor, akan tetapi sekarang ini mereka sudah tidak diperkenankan lagi untuk memborong ikan-ikan hasil tangkapan nelayan setempat. Hal ini, dimaksudkan selain agar tidak terjadi spekulasi harga jual-beli ikan yang dianggap dapat merugikan nelayan dan juga pedagang kuliner warung, juga agar keuntungan tetap berada di pihak masyarakat Dusun Kuwaru sendiri.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pola kepemimpinan ekonomi di daerah penelitian tersebut, walaupun pada sebagiannya ada yang bersifat “patron-client relationship”, namun secara umum lebih bersifat “collegialisme” atau kemitraan kerja yang sejajar. Pemberian keamanan, kemudahan, kelancaran dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam pola-pola hubungan jual-beli di antara nelayan, bakul ikan, dan pedagang kuliner warung merupakan dasar pokok dari setiap kepemimpinan ekonomi yang dijalankan. Pola demikian tampaknya erat berkaitan dengan faktor-faktor penggerak ekonomi dan uang yang pada umumnya tidak berada di tangan ketiga pelaku ekonomi di atas, di samping disebabkan oleh kemampuan masyarakat

setempat di dalam mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang jumlahnya tidaklah terlalu besar.

Munculnya pelaku-pelaku ekonomi lokal (nelayan, bakul ikan dan pedagang kuliner warung) dalam relasi perdagangan ikan, tidak saja memiliki arti penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi para nelayan yang menjadi “kliennya”, tetapi di lain pihak juga telah menciptakan hubungan “patron-klien” yang cenderung melahirkan “ketergantungan ekonomis” bagi umumnya para nelayan. Kecenderungan ini pada dasarnya bukanlah karena alasan-alasan ekonomis semata (untuk mendapatkan hutang atau kredit), tetapi lebih disebabkan karena para nelayan ingin segera menikmati hasil kerjanya, dan tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang jlimet yang berakar pada sikap dan pemikiran sosial-budaya masyarakat nelayan tradisional Dusun Kuwaru.

#### **5.3.4.3.4. Lembaga-lembaga “Kuasi” Investasi Tradisional: Arisan, Hutang, dan Titip Uang**

Dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan “investasi” uang, arisan dan titip uang merupakan gejala umum yang dipraktikkan hampir oleh setiap penduduk sekitar di Dusun Kuwaru, di samping hutang atau kredit.

Di Dusun Kuwaru terdapat tidak kurang dari 10-an kelompok arisan dengan jumlah perolehan arisan bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Keanggotaan para nelayan dalam kelompok arisan bisa lebih dari satu. Hasil uang yang diperoleh dari hasil arisan ini mereka sertakan lagi dalam kelompok-kelompok arisan yang lain, sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh modal untuk membuka usaha perdagangan kecil-kecilan (pedagang warung), membuat rumah, menyelenggarakan lamaran dan pesta perkawinan, naik haji, dan atau dibelikan perahu/jaring kecil untuk melanggengkan matapencarian mereka sebagai nelayan dan pedagang kuliner warung.

Hutang sebagai salah satu karakteristik perekonomian desa tradisional, dalam banyak hal hampir selalu tidak menguntungkan secara ekonomis bagi si penghutang atau peminjam (kreditur). Hal ini, tampaknya kurang disadari oleh masyarakat nelayan tradisional atau pesisir di Dusun Kuwaru, sehingga sampai kini pun masyarakat setempat masih banyak terlibat dalam praktik hutang dan kredit, selain menggabungkan diri ke dalam kelompok-kelompok arisan yang menjamur di Dusun Kuwaru, sebagaimana telah dibicarakan di atas. Hutang atau kredit yang dilakukan oleh masyarakat setempat, umumnya tidak dalam kerangka hubungan kerja antara nelayan dan pedagang kuliner warung. Hutang atau permintaan kredit biasanya dilakukan oleh para nelayan kepada orang-orang kaya tetangga-tetangga mereka sendiri yang sama sekali

tidak memiliki hubungan kerja dengan dirinya, akan tetapi, pada umumnya mereka lebih sering meminjam uang kepada pengurus arisan yang banyak memegang uang-uang titipan para anggotanya, dengan imbalan berupa bunga yang besarnya sekitar 5% perbulan, tergantung pada besarnya jumlah hutang/kredit.

Keterlibatan masyarakat setempat dalam praktik hutang-piutang atau kredit, tampaknya banyak disebabkan oleh sikap hidup mereka yang “kurang menjangkau masa depan”. Bagi mereka, “apa yang diperoleh sekarang, habiskan sekarang juga, besok cari lagi”. Berhemat, menabung atau melakukan investasi uang dan barang untuk pengembangan usaha lain maupun untuk kebutuhan masa depan, hampir-hampir tidak dimiliki oleh sebagian terbesar masyarakat, kecuali para pemilik modal dan pedagang besar. Namun demikian, sikap hidup mereka tidak dapat dikatakan sebagai sikap hidup “boros”, yang lebih berkonotasi pada sikap menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi lebih dikarenakan mereka ingin menyepadankan antara “kerja” dan “hasil kerja” untuk memperoleh kepuasan diri baik secara fisik, psikologis dan “sosial” setelah mereka berjerih-payah seharian atau sehari-semalam menangkap ikan. Sementara itu mereka pun tidak perlu investasi untuk ikan di laut, sebagaimana layaknya mereka yang hidup dari pertanian. Hutang atau kredit yang mereka peroleh pada umumnya tidak diinvestasikan untuk menambah modal usaha tetapi untuk kebutuhan “habis pakai”, seperti membangun rumah, lamaran dan pesta perkawinan, membeli peralatan rumah tangga, atau barang-barang berharga seperti perhiasan emas (kalung, gelang, cincin) terutama ketika akan menjelang lebaran untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya mereka.

Dengan adanya “lembaga-lembaga keuangan informal” dan sistem “kuasi investasi” semacam itu, praktis keberadaan Bank, Koperasi Desa, dan semacamnya belum banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Hal ini dikarenakan kesederhanaan pemikiran ekonomi mereka dan ketidakinginan mereka berhubungan dengan hal-hal yang bersifat prosedural. Di lain pihak, “lembaga-lembaga keuangan informal” dan sistem “kuasi investasi” tersebut telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, aktivitas pedagang kuliner warung di sekitar Pantai Kuwaru, sebagai aktivitas ekonomi utama masyarakat desa pesisiran tradisional di Dusun Kuwaru seperti halnya aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya, tumbuh dan berkembang secara timbal-balik dengan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aktivitas nelayan dan pedagang kuliner warung meliputi banyak aspek antara lain organisasi dan pola kerjasama antar nelayan-bakul ikan-pedagang kuliner warung, hubungan-hubungan ekonomi dalam praktik perdagangan ikan di antara nelayan-bakul ikan-pedagang kuliner warung, maupun keterlibatan para pelaku ekonomi lokal dalam pengembangan struktur ekonomi di tingkat lokal.

Pola relasi kerja baik antara nelayan-bakul ikan-pedagang kuliner warung, bukan semata-mata terjadi dalam kerangka hubungan ekonomis, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas “kesertaan secara sukarela”; tetapi dalam kasus-kasus tertentu bahkan seorang juragan pemilik perahu harus merekrut keanggotaan nelayannya dengan “cara membeli”. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi.

Munculnya pelaku-pelaku ekonomi lokal dalam relasi perdagangan ikan, tidak saja memiliki arti penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi para nelayan yang menjadi “kliennya”, tetapi di lain pihak juga telah menciptakan hubungan “patron-klien” yang cenderung melahirkan “ketergantungan ekonomis” bagi umumnya para nelayan dengan pedagang kuliner warung. Kecenderungan ini pada dasarnya bukanlah karena alasan-alasan ekonomis semata (untuk mendapatkan hutang atau kredit), tetapi lebih disebabkan karena para nelayan ingin segera menikmati hasil kerjanya, dan tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang jlimet yang berakar pada sikap sosial-budaya masyarakat setempat. Faktor ini pula yang akhirnya melahirkan sistem pengelolaan uang dan modal dalam “lembaga-lembaga keuangan informal” yang bersifat “kuasi investasi” seperti arisan dan titip uang.

Sosok masyarakat desa di Dusun Kuwaru, seperti juga masyarakat desa yang lain, kurang memiliki orientasi ke masa depan, atau hal-hal yang “jlimet” lainnya. Kesertaan mereka dalam arisan, titip uang, kredit dan hutang untuk keperluan lamaran, perhelatan perkawinan,



atau untuk membeli perangkat rumah tangga dan persiapan lebaran, selain dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomis, sekaligus nilai-nilai sosial dan budaya. Dengan sikap hidup demikian, kerja keras adalah “tradisi”. Tiada hari tanpa kerja adalah “motto” hidup keseharian masyarakat setempat.

Hal-hal di atas merupakan sejumlah karakteristik terpenting dari masyarakat desa di Dusun Kuwaru, yang justru telah memungkinkan struktur ekonomi di desa mereka dapat dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan ekonomi lokal atau secara “berswasembada”. Berbagai bentuk dan pola perilaku ekonomi masyarakat Dusun Kuwaru di atas, tidak lain sebagai upaya (ikhtiar) mereka untuk senantiasa dapat mempertahankan hidup sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial, budaya, sekaligus ekonomi yang senantiasa berubah ke arah yang lebih “modern” dan “praktis”, tetapi tetap bergerak dalam kerangka sebuah tradisi.

## **6.2. Saran**

Melihat hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka selanjutnya dapat diberikan beberapa saran yakni : perempuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir karena posisinya yang strategis dalam kegiatan berbasis perikanan dan kelautan sebagai pedagang pengecer, pengumpul ikan, pedagang besar, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Namun demikian, dalam berbagai aspek kajian ataupun program-program pembangunan pesisir mereka tidak banyak tersentuh. Ketika berbicara tentang sektor pariwisata dan perikanan yang terlintas dalam pikiran adalah kaum laki-laki yang sebagian atau seluruh hidupnya berjuang di industri pariwisata dan perkasa dalam menghadapi gelombang besar atau angin kencang untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Pikiran demikianlah yang mendorong lahirnya program pembangunan perikanan yang bias gender seperti nampak pada berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir. Kondisi demikian telah dianggap sebagai hal yang lumrah karena dalam budaya kita, perempuan telah lama dikonstruksi secara sosial maupun budaya untuk menjadi “kanca wingking” yang hanya berkutat pada berbagai urusan rumah tangga geraknyapun dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Sehingga artikulasi peran perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya di pesisir menjadi kurang atau tidak tampak.

Keterbatasan ekonomi keluargalah yang menuntut perempuan yang tinggal di pesisir termasuk anak-anak mereka bekerja di daerah pesisir. Dalam kegiatan perikanan laut perempuan berperan sangat strategis terutama pada ranah pasca panen dan pemasaran hasil perikanan. Di beberapa wilayah bahkan peranan perempuan, juga sering menyentuh wilayah yang dianggap sebagai dunia kerja kaum laki-laki yaitu penangkapan ikan. Peran produktif ini,

bagi perempuan pesisir bahkan sering mengalahkan peran reproduktif atau domestik. Kontribusi perempuan yang bekerja di warung sekitar pantai ini terhadap pendapatan keluargapun, dapat mencapai separuh dari pendapatan suami bahkan ada yang melebihi pendapatan suami mereka.

Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seharusnya memperhatikan kondisi perempuan maupun laki-laki atau bersifat gender sensitif. Peran perempuan dapat dioptimalkan apabila faktor penghambat yang melingkupinya teridentifikasi dengan baik. Walaupun secara kuantitatif jumlah perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki, belum banyak rencana pembangunan yang benar-benar mendasarkan pada kebutuhan kaum perempuan, padahal mereka bekerja pada dua fungsi sekaligus, reproduktif dan produktif. Pengembangan program pembangunan yang tidak bias gender memiliki arti yang sangat penting di daerah pesisir disebabkan tidak hanya karena secara kuantitatif jumlah kaum perempuan lebih banyak, tetapi karena peran perempuan di pesisir yang sangat strategis. Partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas produktif di pesisir juga telah banyak terbukti mampu mempertahankan keberlanjutan ekonomi rumah tangganya. Kesempatan peran perempuan dalam aktivitas di sekitar pantai juga memiliki peluang yang cukup baik karena suami mereka memiliki kebiasaan yang baik yaitu menyerahkan hasil usaha melaut mereka kepada kaum perempuan dan sekaligus memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk mengelola keuangan tersebut. Hal ini tentunya menjadikan perempuan lebih mandiri dan berani memutuskan hal-hal penting bagi keluarga dan dirinya. Dukungan internal tersebut akan lebih optimal jika program-program intervensi oleh pemerintah juga menyentuh kaum perempuan pesisir.

Berbagai program pembangunan ke depan perlu menyediakan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki peluang yang sejajar dengan laki-laki. Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan pesisir hanya dapat dilakukan melalui integrasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi atau kabupaten/kota baik pada ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi pembangunan. Upaya ini tidaklah mudah dilakukan jika tidak didukung adanya kesadaran dan kepekaan para pengambil kebijakan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang diikuti oleh program-program yang dapat menjamin keterlibatan para perempuan.

Pembagian peran yang sejajar khususnya dari aspek ekonomi perikanan dimana perempuan yang mengurus pasca panen dan pemasaran hasil perikanan termasuk pengawetan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil, sementara laki-laki pada aspek produksi melalui kegiatan penangkapan ikan dapat menjadi salah satu cara mendorong

partisipasi perempuan yang lebih baik. Peran ini didasari pada berbagai kesulitan dalam kegiatan produksi perikanan laut. Penguatan aspek pasca panen dan pemasaran tidak hanya bermakna bagi para perempuan, tetapi aktivitas perikanan secara keseluruhan karena aspek ini menjadi titik terlemah kegiatan produksi perikanan. Program penguatan dapat dilakukan misal melalui penguatan kelembagaan usaha berbasis kelompok. Penguatan ini memiliki makna positif karena dapat memperkuat *bargaining position* para perempuan terhadap pesaing yang umumnya kaum laki-laki dengan modal yang lebih besar, mempermudah akses terhadap modal, pasar, informasi dan teknologi. Pada akhirnya, pengembangan program pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan yang terpadu dengan kegiatan lainnya seperti wisata bahari merupakan peluang besar bagi aktualisasi peran perempuan pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta : Tarawang.
- Acheson, James M., 1981, Anthropology of Finishing, *Ann Review Anthropology* 10 : 275-316.
- Achmad, S. 1994. *Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan*, Kantor Menteri UPWRI, Jakarta.
- Alimanda, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan dari Ritzer, George, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ancok, Jamaludin. 1996. *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media Yogyakarta
- Andriati, Retno, 2008, Relasi Kekuasaan Suami dan Istri Pada Masyarakat Nelayan, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Surabaya : FISIP Universitas Airlangga, Th. XXI, Januari-Maret 2008.
- Andriati, Retno, 1993, Peran Wanita dalam Pengembangan Perekonomian Rumah Tangga Nelayan Pantai (Studi Kasus di Kejawan Lor, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran, Kotamadia Surabaya). Dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Surabaya : FISIP Universitas Airlangga, Vol. VII, No. 03-04, halm 28-29, Disampaikan pada Lokakarya Nasional : Kerjasama YIIS dan The Toyota Foundation di Cipanas.
- Bank Dunia dalam Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm:23.
- Bengen, D.G. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat*. Bogor, 21-22 September 2001
- Browne, C. V. 1995. "Empowerment in Social Work Practice with Older Woman". *Social Work*, 40, 358-364
- Dzuhayatin. 1996. Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan Dalam Islam, Dalam Buku *Sangkan Peran Gender*, Irwan Abdullah, PPK-UGM, 1996.
- Fariyah, Irzum dan Sunyoto Usman, 2002, "Etos Kerja dan Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Nelayan", dalam *Sosiohumanika*, 15 (2), Mei 2002, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fraskho, Maria, 2000 , "*Praktek dan Teori Pembangunan Ketergantungan*", Analisis CSIS No. 9. Jakarta
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford, USA: Blackwell.
- Foucault, M., 1991, *Power/Knowledge*, Sussex : Trh Harvester Press.
- Geertz, Hildred, 1976, *Indonesian Cultures and Communities*, Alih Bahasa Zainuddin, A. Rahman, *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Ilmu-ilmu Sosial UI.
- Gramsci, A., 1971, *Prison Notebooks*, New York : International Publisher.
- Gutierrez, L. 1990. "Working with Woman of Color". *Social Work*. Kodiran. 1999. Peningkatan Partisipasi Wanita dan Pengembangan Hubungan Industrial Yang Berwawasan Gender di Kawasan Timur Indonesia, *Jurnal Gender* Volume I No. 1, Juli Yogyakarta.
- Haralambos, M., Holborn, M & Heald, R, 2000, *Sociology : Themes & Perspectives*, London, Harpecollin.
- Harsoyo, E. Harmayani, A. Suryantini, 1999, Dampak Pembangunan Pertanian Terhadap Marginalisasi Tenaga Kerja Wanita : Kasus Usahatani Salak di Kabupaten Sleman, *Jurnal Gender* Vol (1) : 44-57.

- Keban, Yeremias T., dan Gabriel Lele, 1999, *Capacity Building dalam Wacana Pembangunan Kontemporer : Telaah Konseptual dan Implikasinya*.
- Kusnadi, 2000, *Nelayan : Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kusnadi, 2001, *Pengamba : Kaum Perempuan Fenomenal*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Krisnawaty, Tati, 1993, *Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive, Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Laksono-Supelli, K. 1999. Upaya Memahami Kerja Perempuan. Jurnal Perempuan. Edisi 11.
- Latief, Muh. Syahbudin dan Suryatiningsih, 1994. Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Desa Miskin, dalam Mubyarto 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Lorber, Judith, 1991, *Social Construction of Gender*, Sage Publications, Newbury Park California.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda?*, Bandung : Mizan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh T.R. Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeljarto, V. 1996. Pembangunan Kelompok Miskin melalui Program IDT. Dalam O.S. Priyono & A. M. W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Moore, Henrietta L, 1988, *Feminism and Anthropology*, Oxford : Polity Press.
- Mubyarto, Suyono Dikun, Ed, 1995, *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. P3PK UGM. Yogyakarta.
- Pranarka dan Moeldjarto, 1996. Pemberdayaan (Empowerment), Dalam *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Pranarka dan Priyono, Onny. S. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta
- Putra, Heddy Shri A., 2003, *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa : Esai-Esei Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Ruth Indiah. 1996. Politik Gender Orde Baru, *Prisma*, No. 5 Tahun XXV, Mei, Jakarta.
- Sajogyo, P. 1979. *Meneliti Peranan Wanita di Pedesaan*, Bogor : Institut Pertanian Bogor, Lembaga Sosiologi Pedesaan (LPSP).
- Sajogyo, P. 1983. *Meneliti Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta : CV Rajawali.
- Sajogyo, P. 1987. Pengembangan Peranan Wanita Khususnya di Pedesaan Yang Sedang Berubah dari Masyarakat Pertanian ke Industri di Indonesia 1981-1987, *Seminar Fungsi Sosial Ekonomi Wanita Indonesia*.
- Saptari, R., & Holzner, B. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Scott, James C., 1981, *Moral Ekonomi*, Terjemahan, Jakarta : LP3ES.
- Semedi, P., 2003, *Close to Stone, Far From The Throne : The Story of a Javanese Fishing Community, 1820-1990s*, Yogyakarta : Benang Merah.
- Setyawati, Yuningtyas, 2005, Diversifikasi Bidang Usaha Rumah Tangga Nelayan Pantai Ngrenehan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga, *Laporan Penelitian* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soejadi. (2001). *"Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan"*. Philosophy Press: Yogyakarta.
- Soetrisno, L. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Spradley, James P, 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Stewart, A.M. 1998. *Empowering People (Pemberdayaan Sumberdaya manusia)*. Diterjemahkan oleh Agus M. Hardjana. Yogyakarta: Kanisius

- Sukei, K. 1999. "Beberapa Alat Kajian Jender dalam Pembangunan". *Makalah Yang disajikan dalam Kajian Jender dalam Pendidikan dan Pengajaran* Malang: Puslit-Lemlit IKIP Malang.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Stabilisasi Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial*, BAPPENAS, Jakarta.
- Susanti, E., Suyanto, B., & Sutinah, 1996. *Community Support System Bagi Perempuan Bekerja : Studi Tentang Peran Institusi Sosial di Tingkat Keluarga, Kerabat, dan Komunitas yang Mendukung Keterlibatan Perempuan di Sektor Publik*. Surabaya: Pusat Studi Perempuan Unair
- Sutiono, Agus & Ambar Teguh Sulistiyani, 2003 "Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia," dalam Ambar TS (ed), *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm:21.
- Sutrisno, Loekman, 1993. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Kemiskinan Dari Perspektif Perempuan, Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Aditya Media Yogyakarta.
- Thadani, VN, dan M.P. Todaro, 1979. *Female Migration in Developing Countries : A. Frame Work for Analysis*, *Working Paper No. 47*.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- White B, El. Hastuti, 1980, *Subordinasi Tersembunyi Pengaruh Pria dan Wanita dalam Kegiatan Rumah Tangga dan Masyarakat di Dua Desa Jawa Barat*, Bogor : Studi Dinamika Pedesaan Survey Agro Ekonomi dan Institut Pertanian Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan.



# **LAMPIRAN**

# KUESIONER

## **Pemberdayaan Perempuan Pesisir Melalui Pengembangan Manajemen Komoditas Perekonomian Berbasis Potensi Lokal**

(Studi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai  
Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY)



Oleh :  
**Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



**No. Responden :**

.....

### **Identitas Responden Dan Keluarga**

1. Alamat responden : .....
2. Umur responden : ..... tahun
3. Umur pasangan responden : ..... tahun
4. Jumlah anak responden : ..... orang
5. Umur anak responden
  - a. Anak I : ..... tahun
  - b. Anak II : ..... tahun
  - c. Anak III : ..... tahun
  - d. Anak IV : ..... tahun
  - e. Anak V : ..... tahun
6. Pendidikan terakhir responden : .....
7. Pendidikan terakhir pasangan responden : .....
8. Pekerjaan utama responden :
  - a. Sektor pertanian, sebutkan .....
  - b. Sektor perikanan, sebutkan .....
  - c. Sektor perdagangan, sebutkan .....
  - d. Sektor jasa, sebutkan .....
  - e. Lainnya, sebutkan .....
9. Pekerjaan sampingan responden :
  - a. Sektor pertanian, sebutkan .....
  - b. Sektor perikanan, sebutkan .....
  - c. Sektor perdagangan, sebutkan .....
  - d. Sektor jasa, sebutkan .....
  - e. Lainnya, sebutkan .....
10. Pekerjaan utama pasangan responden :
  - a. Sektor pertanian, sebutkan .....
  - b. Sektor perikanan, sebutkan .....
  - c. Sektor perdagangan, sebutkan .....
  - d. Sektor jasa, sebutkan .....
  - e. Lainnya, sebutkan .....
11. Pekerjaan sampingan pasangan responden :
  - a. Sektor pertanian, sebutkan .....
  - b. Sektor perikanan, sebutkan .....
  - c. Sektor perdagangan, sebutkan .....
  - d. Sektor jasa, sebutkan .....
  - e. Lainnya, sebutkan .....

### **Aktivitas Perempuan Dalam Mencari Nafkah**

12. Apa alasan Ibu ikutserta melakukan aktivitas di sektor perikanan?

.....  
.....

.....  
13. Jenis ikan apa saja yang biasanya Ibu jual?  
.....  
.....  
.....

14. Bagaimana cara Ibu memperoleh ikan yang akan Ibu jual?

- a. Langsung memperoleh dari suami sehabis melaut
- b. Membeli di TPI
- c. Membeli dari teman sesama penjual ikan
- d. Lainnya, sebutkan .....

15. Bagaimana cara kerja Ibu dalam menjual ikan tersebut?

- a. Dijual sendiri
- b. Dijual secara berkelompok
- c. Lainnya, sebutkan .....

16. Biasanya ikan yang Ibu jual dalam bentuk apa?

- a. Ikan segar
- b. Ikan yang telah dimasak
- c. Tergantung selera pembeli
- d. Lainnya, sebutkan .....

17. Berapa banyak ikan rata-rata per-hari terjual?

.....  
.....  
.....

18. Berapa pula pendapatan rata-rata per-hari dari hasil penjualan ikan tersebut?

.....  
.....  
.....

19. Berapa rata-rata alokasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas mencari nafkah dalam seharinya?

.....  
.....  
.....

### **Aktivitas Rumah Tangga Perempuan**

20. Siapa di rumah yang paling sering melakukan kegiatan rumah tangga?

- a. Istri
- b. Anak perempuan
- c. Suami
- d. Anak laki-laki
- e. Istri dan suami
- f. Seluruh anggota keluarga
- g. Lainnya, sebutkan .....

21. Jenis pekerjaan rumah tangga apa saja yang biasa dilakukan istri dan atau anak perempuan di rumah?

.....  
.....  
.....

22. Berapa jam dalam sehari alokasi waktu yang Ibu pergunakan untuk melakukan kegiatan kerumah tanggaan?

.....

.....  
.....

23. Apakah biasanya suami juga membantu aktivitas kerumah tanggaan Ibu?  
a. Selalu  
b. Kadang-kadang  
c. Tidak pernah
24. Apa alasan suami ikutserta membantu Ibu melakukan kegiatan kerumah tanggaan?

.....  
.....  
.....

**Aktivitas Pribadi dan Kemasyarakatan Perempuan**

25. Apa saja jenis aktivitas pribadi yang biasa Ibu lakukan dalam kesehariannya?
26. Berapa rata-rata alokasi waktu yang Ibu pergunakan untuk melakukan aktivitas pribadi tersebut?
27. Kegiatan kemasyarakatan apa saja yang Ibu ikuti selama ini?
28. Apa alasan Ibu mengikuti aktivitas kemasyarakatan tersebut?
29. Berapa alokasi waktu yang Ibu perlukan untuk melaksanakan aktivitas kemasyarakatan tersebut?

.....  
.....  
.....

**CATATAN-CATATAN :**



**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG TAK  
TERHINGGA KEPADA SELURUH RESPONDEN, ATAS KERJA  
SAMA DAN KESEDIAAN DALAM MENJAWAB  
PERTANYAAN-PERTANYAAN KAMI DAN MELUANGKAN  
WAKTU-NYA. SELANJUTNYA ATAS SEGALA KEKURANGAN  
DAN KESALAHAN DALAM BERTUTUR DAN BERTINDAK  
KAMI MOHON MAAF YANG SEBESAR-BESARNYA.**

